

ISLAM DAN POLITIK



MAKALAH

Diajukan Pada Seminar/Diskusi Konsentrasi Pemikiran Islam Semester 3
Dalam Mata Kuliah Pemikiran Politik Islam

OLEH
GALIH SAPUTRA
80100216069

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembicaraan tentang politik Islam merupakan topik yang penting dalam khazanah pemikiran Islam. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk politik ekonomi sosial dan budaya Islam merupakan agama yang paling kaya dalam pemikiran politik. Pemikiran politik Islam dirangkai secara lengkap mulai masalah etika politik filsafat politik hukum hingga tata Negara.

Keragaman khazanah pemikiran politik Islam bisa dikatakan bermuara pada pemikiran tentang hubungan agama dan Negara. Hubungan keduanya memiliki perjalanan sejarah yang cukup panjang. Berawal dari sebuah komunitas yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah yang diyakini tidak hanya komunitas agama saja tetapi juga komunitas politik Nabi Muhammad telah berhasil menyatukan semua suku yang berseteru dalam satu wadah yaitu komunitas Islam. Lebih daripada itu Nabi Muhammad telah berhasil membentuk Negara Madinah. Komunitas inilah yang disebut oleh pemikiran Islam sebagai bentuk dari negara ideal. Namun pasca Khulafaurrasyidin perkembangan politik Islam mengalami pasang surut.

Pada abad pertengahan para pemikir muslim seperti Al Farabi Al Mawardi dan Al Ghazali menawarkan alternatif sistem politik Islam yang seimbang. Masa ini diwarnai kondisi politik yang mapan lalu mengalami kelemahan akibat serangan bangsa Mongol. Kemudian muncul kerajaan besar di dunia Islam seperti Turki Utsmani Mughal di India dan Safawi di Iran. Para pemikir masa ini masih berkuat seputar otoritas suku Quraisy sebagai pemegang khalifah universal.

Lalu pada masa modern terjadi perubahan terhadap pemikiran politik Islam ketika gagasan gagasan Barat mulai masuk ke dunia Islam seiring dengan penjajahan yang dilakukan Barat. Maka muncullah wacana tentang demokrasi parlemen dan pembatasan kekuasaan kepala Negara. Dalam merespons gagasan Barat tersebut para pemikir terbagi dalam beberapa paradigma pemikiran

kelompok yang mengintegrasikan hubungan agama dan politik memisahkan kedua varian tersebut atau memandang adanya hubungan yang seimbang. Walaupun tidak semua tokoh disebutkan namun pemikiran dan gagasan politik Islam pada masa modern dapat memberikan gambaran akan dinamika politik Islam yang terjadi saat itu hingga berpengaruh pada peta politik Islam Indonesia kontemporer.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa pengertian politik?
- b. Apa pengertian Islam politik?
- c. Bagaimana hubungan Islam dan politik?
- d. Apa dalil berpolitik dalam Islam?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Politik

Secara etimologis, politik berasal dari kata *polis* (bahasa Yunani), yang artinya negara kota. Namun kemudian dikembangkan dan diturunkan menjadi kata lain seperti *polities* (warga negara), *politikos* (kewarganegaraan atau civic), dan *politike tehne* (kemahiran politik), dan *politike epistem* (ilmu politik)¹.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu.² Jadi politik ialah suatu proses dalam melaksanakan maupun dalam mencapai tujuan dari politik itu sendiri.³

Lain lagi pandangan dari Ramlan Surbakti (1992:11), yang menyatakan bahwa politik ialah interaksi antara pemerintah dan masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Sedangkan Menurut Hasan al-Banna⁴, Politik adalah upaya memikirkan persoalan internal (mengurus persoalan pemerintah, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan haknya, melakukan pengawasan kepada terhadap penguasa untuk kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan), dan persoalan eksternal umat/rakyat

¹ Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2003), h. 1

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Cet. Ke-30; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 8

³ Yuliyanto Muhammad Dwi, "Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat " Abangan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 11. <http://eprints.uny.ac.id/8643> (29 Maret 2018)

⁴ Utsman Abdul Mu'iz Ruslan, *Tarbiyah Siyasah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik "Ikhwan" untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya dari Tahun 1928 hingga 1954*, (Solo: Era Intermedia, 2000), h. 72

(memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukan ditengah-tengah bangsa lain, serta membebaskan dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusanya) memberikan perhatian kepadanya, dan bekerja demi kebaikan seluruhnya (*kemaslahatan umat*).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang luas.⁵

B. Pengertian Islam Politik

Islam merupakan *al-Din*; dan istilah *al-Din* dalam al-Qur'an tercantum dalam QS. Ali 'Imran/3:19 dan QS. Al-Ma'idah/5:3). Perkataan *al-Din* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan perkataan "agama". Secara konsepsional perkataan *al-Din* dan "agama" mengandung konotasi yang sangat berbeda. Perkataan agama⁶ yang sudah lazim digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sansekerta yang memiliki konotasi yang sangat erat dengan tradisi dalam agama Hindu dan Budha. Perkataan *al-Din* sebagaimana tercantum dalam dua ayat al-Qur'an tersebut di atas merupakan suatu konsep yang terdiri dari dua komponen pokok pengaturan hubungan manusia dengan Allah (hubungan vertikal) dan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat atau negara, bahkan mungkin pula antar negara serta antar manusia dengan lingkungan hidupnya (hubungan horizontal).⁷

⁵ Yuliyanto Muhammad Dwi, "Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat " Abangan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 12. <http://eprints.uny.ac.id/8643> (29 Maret 2018)

⁶ Lihat, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Agama Segenap Kepercayaan kepada Tuhan, Dewa dan sebagainya serta dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Rumusan tersebut lebih dipusatkan pada hubungan manusia dengan Tuhan, karena itu rumusan agama sebagaimana dikutip di atas berbeda dengan substansi yang dicakupoleh al-din al-Islami yang lebih luas dari agama.

⁷ Salah satu prinsip agama Islam adalah *hablun min Allah wa hablun min al-nas* atau "hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya" tercantum dalam al-Qur'an,

Istilah *al-Din* mengandung konsep yang mencakup dua aspek kehidupan manusia, yaitu aspek religius-spiritual dan aspek kemasyarakatan yang bertumpu pada ajaran tauhid (unitas).⁸ Para sarjana muslim⁹ membagi *al-Din al-Islami* menjadi tiga komponen yaitu ‘aqidah, syari’ah dan akhlaq.¹⁰ Ketiga komponen suatu totalitas yang tidak dapat dipisahkan. Dalam tiga komponen ini pula terlibat tiga faktor yang saling berkaitan, yaitu posisi Allah, manusia, baik sebagai individu maupun sebagai suatu kelompok masyarakat dan alam lingkungan hidup manusia. Islam bukan hanya sekedar agama yang mengandung seperangkat doktrin ritual, tetapi ia merupakan suatu pandangan dunia yang holistik yang menyeluruh dan sistematis. Islam sebagai *al-Din* mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.¹¹

Sebagai agama yang komprehensif, Islam menyatukan berbagai persoalan moral dan materil, serta mencakup berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat.¹² Bahkan falsafah umum Islam menggabungkan antara dua persoalan tersebut, dan tidak membedakan antara keduanya selain hanya perbedaan sisi pandang saja. Menurut Yusuf Qardhawi¹³, Islam yang benar adalah akidah dan ibadah, tanah air dan kebangsaan, toleransi dan kekuatan, moral dan

(QS. Al-mran/3:112), “Ditimpakan kepada mereka kehinaan, di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka menjaga hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia”.

⁸ Tauhid adalah konsep ketuhanan Yang Mahaesa yang dibawa oleh para rasul dan nabi sejak Nabi Adam as. sampai Nabi Muhammad saw. Cukup banyak ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung ajaran tauhid, antara lain QS. Al-Baqarah/2: 163, Ali ‘Imran/3:62, An-Nisa’/4:171, an-Nahl/16:22, Muhammad/47:19, dan al-Ikhlâs/112:1.

⁹ Salah seorang diantara mereka adalah Syaikh Mahmud Syaltout yang menulis buku berjudul *Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah*, terj. Bustami A. Gani dkk (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), Jilid I s/d V.

¹⁰ Ahmad Sukardja & Muzar Ibnu Syarif, *Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 59.

¹¹ Zuhraini, “Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik”, *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2014), h.33. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/639> (30 Maret 2018)

¹² Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 23.

¹³ Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, terj. Syafril Halim, h. 23.

materiil, kebudayaan dan hukum. Karena itu, aspek-aspek negara, hukum, demokrasi dan politik hanyalah merupakan bagian-bagian dari *al-Din al-Islami*.

Berbeda dengan pemikiran Barat yang memisahkan agama dari negara, hukum, demokrasi dan politik, maka pemikiran Islam, negara, hukum demokrasi, dan politik sangat berkaitan erat dengan agama. Dalam Islam tidak dikenal dikotomi, baik antara agama, negara, hukum, demokrasi dan politik. Sebagaimana hasil penelitian Muhammad Tahir Azhari¹⁴ dengan menggunakan teori lingkaran konsentris, maka apabila komponen agama, hukum dan negara disatukan akan membentuk lingkaran konsentris yang merupakan suatu kesatuan dan berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Dalam Islam kaidah-kaidah *din al-Islam* yang terdiri dari tiga komponen besar, yaitu akidah dengan tauhid sebagai titik sentral, syari'ah dan akhlak harus tercermin dalam sturuktur dan substansi hukum, sehingga konsep hukum dalam lingkungan itu berisi bukan hanya semata-mata hukum dalam arti normatif saja, tetapi juga hukum dan kesusilaan.¹⁵

Politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *siyasah*. Oleh sebab itu, di dalam buku-buku para ulama dikenal istilah *siyasah syar'iyah*. Dalam Al Muhith, *siyasah* berakar kata *sâsa -yasûsu*. Dalam kalimat *Sasa addawaba yasusuha siyasatan* berarti *Qama 'alaiha wa radlaha wa adabbaha* (mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya). *Al-Siyasah* juga berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, mengatur kaum, memerintah, dan memimpinya.¹⁶

Secara tersirat dalam pengertian *siyasah* terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

- a. "Tujuan" yang hendak di capai melalui proses pengendalian;
- b. "Cara" pengendalian menuju tujuan tersebut

¹⁴ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 67.

¹⁵ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, h. 68.

¹⁶ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No 1, (Maret 2015), h. 88-89, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2204> (31 Maret 2018)

Secara istilah politik islam adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara'. Pengertian siyasah lainnya oleh Ibn A'qil, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Qayyim, politik Islam adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah Swt. tidak menentukannya. Pandangan politik menurut syara', realitanya pasti berhubungan dengan masalah mengatur urusan rakyat baik oleh negara maupun rakyat. Sehingga definisi dasar menurut realita dasar ini adalah netral. Hanya saja tiap ideologi (kapitalisme, sosialisme, dan Islam) punya pandangan tersendiri tentang aturan dan hukum mengatur system politik mereka. Dari sinilah muncul pengertian politik yang mengandung pandangan hidup tertentu dan tidak lagi "netral".¹⁷

Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, karenanya mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok Politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, *khittah* perjuangan, serta wacana Politik Model Islam Struktural bisa melalui Islam Politik (partai politik) atau juga tidak melalui partai.¹⁸

Dengan kata lain bahwa dalam Islam politik itu sesuatu yang memang harus ada. Namun tetap mempunyai aturan dalam pelaksanaannya, karena politik Islam senantiasa memegang teguh nilai-nilai moral dan tetap mementingkan

¹⁷ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No 1, (Maret 2015), h. 88-89, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2204> (31 Maret 2018)

¹⁸ Nasiwan, *Diskursus Antara Islam dan Negara Suatu Kajian tentang Islam Politik*, (Pontianak: Yayasan Insan Cinta, 2003), h. 101

kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang digunakan untuk kemaslahatan ummat.¹⁹

C. Hubungan Islam dan Politik

Hubungan antara Islam dan politik, bukan saja telah banyak dibicarakan dan ditulis, tapi juga dipandang sebagai hal yang tak mungkin dielakkan. Memang, pada agama-agama selain Islam pengalaman hubungan tersebut dijumpai²⁰, namun dalam Islam hubungan tersebut semakin terasa relevansinya, terutama pada masa sekarang, misalnya, saat diperbincangkan hubungan Islam dengan konsep-konsep politik, seperti kekuasaan, kedaulatan, susunan masyarakat, demokrasi, hak-hak asasi manusia, dan lain-lain.²¹ Menurut almarhum Buya Hamka, Islam adalah agama dan negara. Tidak ada pemisahan di antara keduanya, sedangkan pemerintah merupakan perlengkapan agama.²²

Pendapat ini bisa dipahami, karena melaksanakan pengabdian (ibadah) dalam arti yang sebenar-benarnya kepada Allah swt. tidak apat dilakukan tanpa dukungan penuh dari sebuah pemerintahan Islam, seperti menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar.²³

¹⁹ Yuliyanto Muhammad Dwi, "Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat " Abangan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 13. <http://eprints.uny.ac.id/8643> (29 Maret 2018)

²⁰ Penyatuan antara agama Kristen dalam imperium Romawi Suci, antara agama Buddha dan negara dalam Kerajaan Sriwijaya di masa lalu dan Tibet sebelum invasi RRC, antara agama Hindu dan Negara dalam Kerajaan Majapahit di masa silam Nusantara; dan dalam masa modern; penyatuan antara agama dan Negara, sampai batas tertentu, pada kenyataannya bahwa Kepala Negara Kerajaan Inggris Raya adalah juga Kepala Gereja Anglikan; bahkan, dari sudut pandang analisis tertentu, misalnya kerangka analisis social agama, Amerika Serikat pun dapata disebut sebagai sebuah Negara yang memangku dan menghirup dalam nilai-nilai agama, dalam hal ini Kristen Protestan, aliran Puritanisme (Nurcholis Madjid, 1991)

²¹ Moch. Qasim Mathar, *Politik Islam dalam Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 29

²² Hamka, "Studi Islam" dalam Abd. Wahid, "Pemikiran Politik dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 9 no. 1 (Januari 2010), h.77. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/1411/1029> (30 Maret 2018)

²³ Abd. Wahid, "Pemikiran Politik dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 9 no. 1 (Januari 2010), h.77. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/1411/1029> (30 Maret 2018)

Eratnya kaitan antara Islam dan politik, segera tampak pada saat Nabi Muhammad saw. masih dan mengalami embargo di Makkah dari kalangan kafir Quraisy. Pada masa embargo tersebut, sudah terjadi hijrah ke Habasya (Etiopia) yang dilakukan kaum Muslimin untuk meminta suaka kepada Kaisar Kristen, Negus, di negeri tersebut. Meskipun istilah politik, embargo, dan suaka baru-baru saja akrab di lingkungan kita sebagai akibat pergolakan politik masa modern, namun kedua istilah politik tersebut telah diterapkan, dalam arti politik sebenarnya, terhadap kaum Muslimin ketika itu.²⁴

Moch. Qasim Mathar berpendapat bahwa hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad ke Madinah, adalah karena di Makkah, kekuatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan, tidak berada di tangan Nabi Muhammad, suatu kondisi yang secara sosial politik, tidak memungkinkan bagi Nabi tersebut memiliki suatu kekuasaan (legitimasi dan otoritas) guna lebih meluaskan pengaruhnya dalam mengembangkan agama yang beliau bawa.²⁵

Secara khusus, hubungan masalah politik dengan aliran teologi bermula sesaat setelah baginda Rasulullah saw. wafat. Ketika itu persoalan politik pertama yang muncul adalah siapa yang berhak menggantikan beliau? Bagaimana cara pengangkatannya dan apa saja kriterianya? Suksesi pertama dalam sejarah kaum muslimin ini berjalan mulus dengan dibaiatnya Abu Bakar ra. secara aklamasi walaupun melalui proses demokrasi dan musyawarah yang alot. Dengan demikian persoalan-persoalan di atas sudah terjawab. Abu Bakar lah yang paling berhak sebagai khalifah pertama dengan cara musyawarah lalu dibaiat, karenanya beliau memiliki kriteria-kriteria yang dapat diterima oleh seluruh umat muslimin saat itu.²⁶

²⁴ Moch. Qasim Mathar, *Politik Islam dalam Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi*, h. 29-30

²⁵ Lihat Moch. Qasim Mathar, *Politik Islam dalam Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi*, h. 30

²⁶ Husain bin Muhammad bin al-Jâbir, *Al-Thariq ila Jama'at al-Muslimin*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, *Menuju Jamaatul Muslimin; Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*, (Cet. Ke-4; Jakarta: Robbani Press, 1996), h. 87

Tanpa mengurangi kebijaksanaan dan kebesaran yang telah dipraktekkan di dalamnya, masa Khalifah Rasyidah, dengan keempat khalifahnya dari sahabat utama Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, merupakan masa yang menyebabkan bidang politik dan bidang teologi bagai dua keping dari satu mata uang, berkelindan dan saling berintegrasi. Hal itulah yang dimaksud Harun Nasution (Harun Nasution, 1986: 1) ketika dia menulis: *Agak aneh kiranya kalau dikatakan bahwa dalam Islam, sebagai agama, persoalan yang pertama-tama timbul adalah dalm bidang politik dan bukan dalam bidang teologi. Tetapi persoalan politik itu segera meningkat menjadi persoalan teologi.*²⁷

Di dalam seluruh sejarah kemanusiaan, Islam telah menyumbangkan sesuatu yang sangat besar yang tidak ternilai harganya, ialah suatu “model negara”, yang dinamakannya “Negara Islam” atau *Daulah Islamiyah*.²⁸

Dalam Negara Islam yang menjadi dasar ialah Firman Tuhan dan suara rakyat (musyawarah). Dengan tegas dapat dikatakan bahwa firman Tuhan (*Fox Dei*) dan ajaran Nabi (*Fox Prophetae*) bergabung dengan suara rakyat (*Fox Popule*), menjadi kekuasaan tertinggi di dalam negara.²⁹

Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, ataupun tempat pembaiatan pemimpin/kepala Negara, dan lainnya lagi, tetapi masjid juga dijadikan tempat mempelajari teori-teori politik disamping ilmu agama dan lainnya.³⁰

²⁷ Moch. Qasim Mathar, *Politik Islam dalam Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 29-30

²⁸ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 68

²⁹ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jilid II, h. 69

³⁰ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam*, Jilid II, h. 248

4. Dalil Berpolitik dalam Islam³¹

Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya :
"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah."
 (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jelaslah bahwa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat.

Rasulullah SAW. bersabda :

"Siapa saja yang bangun di pagi hari dan dia hanya memperhatikan urusan dunianya, maka orang tersebut tidak berguna apa-apa di sisi Allah; dan barang siapa yang tidak memperhatikan urusan kaum Muslimin, maka dia tidak termasuk golongan mereka (yaitu kaum Muslim). (Hadis Riwayat Thabrani)

³¹ Abdullah Zawawi, "Politik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No 1, (Maret 2015), h. 88, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2204> (31 Maret 2018)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut uraian yang telah dikemukakan terkait dengan materi *makalah Islam dan politik* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, warganegara, kekuasaan dan segala proses yang menyertainya adalah tak lepas daripada yang namanya politik. Jadi politik memiliki arti yang luas;
2. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok;
3. Islam dan politik jelas tidak dapat dipisahkan. Nabi Muhammad sendiri ialah seorang politikus handal yang bisa menjadi pemimpin bagi rakyatnya. Bahkan di zaman Islam pertama dahulu, masjid itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah saja, tapi juga mempunyai fungsi politik yang sangat penting. Bukan saja tempat praktik politik seperti tempat musyawarah, ataupun tempat pembaiatan pemimpin/kepala Negara, dan lainnya lagi, tetapi masjid juga dijadikan tempat mempelajari teori-teori politik disamping ilmu agama dan lainnya;
4. Rasulullah SAW sendiri menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: *"Adalah Bani Israil, mereka diurusi (siyasah) urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada banyak para khalifah."* (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jelaslah bahwa politik atau siyasah itu bermakna adalah mengurus urusan masyarakat.

PEMIKIRAN POLITIK SAYYID QUTB DAN GAMAL ABDEL NASSER



MAKALAH

Diajukan Pada Seminar/Diskusi Konsentrasi Pemikiran Islam Semester 3
Dalam Mata Kuliah Pemikiran Politik Islam

OLEH
GALIH SAPUTRA
80100216069

Dosen Pemandu:
Prof. Dr. Usman Djafar, M.Ag
Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.Ag.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR

2018

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sayyid Qutb adalah salah satu tokoh politik yang digolongkan pada kelompok fundamentalis Islam.¹ Ia telah merumuskan sejumlah agenda politik yang tertuang dalam berbagai karyanya terutama *Ma'alim fi at-Thoriq*. Pemikiran-pemikiran politiknya telah memberikan pengaruh pada gerakan-gerakan pemuda dalam menghadang Barat di berbagai negara terutama Mesir. Secara tidak langsung mungkin dapat dikatakan ada geneologi kekerasan yang dihubungkan dengan teori politik Qutb yang mengakibatkan lahirnya golongan pejuang muslim garis keras di beberapa belahan bumi. Apakah benar sedemikian ekstrimnya pemikiran Qutb? Agar tidak terjebak untuk saling tuduh menuduh, maka perlu dikaji dan diperdalam sejauh mana pemikiran Qutb dan agenda-agenda politiknya dalam membela keyakinannya. Serta mengapa muncul pemikirannya tersebut?

Sejak negara Mesir berdiri, para tokoh pendirinya (*the founding fathers*) telah mencanangkan gerakan nasionalisme dan ukhuwwah secara total. Banyak tokoh pendiri negara seperti Taufik Kamil, Muhammad Ali, Muhammad Naguib, dan Gamal Abdel Nasser bertekad bulat untuk membangun negara tersebut sebagai negara plural, baik dari segi bangsa, agama, budaya, maupun bahasa. Di antara para tokoh ini, Nasser memiliki pengaruh terbesar di negara tersebut. Bahkan, juga bergaung sampai ke negara lain baik Arab, Asia, maupun Afrika.

B. Rumusan Masalah

- a. Siapa tokoh Sayyid Qutb?
- b. Bagaimana pemikiran politik Sayyid Qutb?
- c. Siapa tokoh Gamal Abdel Nasser?
- d. Bagaimana pemikiran politik Gamal Abdel Nasser?

BAB II

PEMBAHASAN

A. Sayyid Qutb

1. Biografi

Sayyid Qutb dilahirkan pada tanggal 9 Oktober 1906 di Musha, Asyut, Mesir atas (325 kilometer dari Kairo) dari keluarga yang memiliki tanah yang luas, meskipun tidak kaya. Ayahnya pemuka desa dan menikah dua kali. Dia memiliki satu saudara laki-laki yang lebih tua yaitu Muhammad dan dua orang adik perempuan bernama Hamidah dan Aminah. Ayahnya tuan rumah yang dermawan sehingga memaksakan dirinya menggadaikan tanahnya, dan terkadang terpaksa melepaskan tanahnya kepada para pemberi kredit.¹ Qutb adalah seorang penulis, intelektual Mesir, dan Islamis yang bergabung dengan Persaudaraan Muslim Mesir (*ikhwan al-muslimin*). Sejak kecil ia sudah menghafal al-Qur'an. Kemudian ia pindah ke Kairo, dimana ia mengenyam pendidikan Barat antara tahun 1929 dan 1933, sebelum memulai karirnya sebagai seorang guru di *Ministry of Public Instruction*.

Pada pertengahan karirnya, Qutb memfokuskan dirinya pada tulisan-tulisan sebagai pengarang dan pengkritik, menulis sejumlah novel seperti *Ashwak* dan memperkenalkan novelist Mesir Naguib Mahfouz dari ketidak terkenal. Pada tahun 1939, dia menjabat sebagai fungsionaris pada Menteri Pendidikan Mesir (*wizarat al-Ma'arif*). Dari tahun 1948 hingga tahun 1950, ia berangkat ke Amerika dalam rangka mendapatkan beasiswa untuk belajar Sistem Pendidikan, menerima gelar master dari The Colorado State College of Education (sekarang University of Northern Colorado). Karya pertamanya tentang kritik sosial keagamaan, *Al-'adala al-Ijtima'iyya fi-al-Islam (keadilan sosial dalam Islam)*, dipublikasikan pada tahun 1948, pada saat di luar negeri.

Qutb lebih dikenal dengan karya teoretikalnya dalam meredefinisikan rumusan Islam fundamentalis dalam perubahan sosial dan politik, secara spesifik

¹ David Sagiv, "Islam Otentitas Liberalisme", alih bahasa: Yudian W. Asmin, dalam Juandi, *Pemikiran Politik Sayyid Qutb: Melacak Geneologi Kekerasan*,

terdapat dalam karyanya “Keadilan Sosial” dan *Milestone* (petunjuk jalan). Pada tahun awal-awal Qutb terjun ke dunia tulis menulis, dia termasuk seorang penulis nasionalis, liberal bahkan skuler. Kemudian pada tahun 1945 ia menerbitkan karyapertamanya yang menunjukkan kembalinya ke Islam yaitu *at-Tasawwur al-Fanni fi al-Qur'an* (Persepsi Artistik dalam al-Qur'an).² Karya tafsir Qur'annya yang luas *Fi Zhilal al-Qur'an* (Di Bawah Lindungan al-Qur'an) telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap persepsi-persepsi moderen tentang konsep-konsep Islam seperti jihad, jahiliyyah dan ummah.

Pada tahun 1955 sekitar bulan Mei, Qutb termasuk salah seorang pemimpin *ikhwan al-muslimin* yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh Presiden Nasser dengan tuduhan berkomplotan untuk menjatuhkan pemerintahan. Pada tanggal 13 Juli 1955, pengadilan rakyat menjatuhkan hukuman 15 tahun kerja keras kepadanya. Ia ditahan di beberapa penjara Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Pada tahun itu pula ia dibebaskan atas permintaan Abdul Salam Arif, presiden Irak yang mengadakan kunjungan ke Mesir. Setahun kemudian ia ditangkap lagi bersama saudara-saudaranya dan dua puluh ribu orang, termasuk diantaranya 700 wanita. Tanggal 12 April 1966, Qutb diadili oleh pengadilan Militer dengan tuduhan berupaya menumbangkan pemerintahan Mesir dengan kekerasan lewat karya *Ma'alim fi aththariq*-nya. Pada 21 Agustus 1966, Ia bersama Abd al-Fatah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasy dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Kemudian ia bersama dua orang temannya dihukum gantung pada tanggal 29 Agustus 1966.

Meninggalnya Qutb secara fisik tidak berarti hilangnya ide-ide pemikirannya tentang Islam dan politik. Banyak karyanya yang sampai sekarang masih memberikan pengaruh yang kuat bagi para pejuang muslim fundamentalis. Karya-karyanya antara lain: *Al-Taswirul fanny fi al-Qur'an* (Seni Artistik dalam al-Qur'an), *Masyahid al-Qiyamah fi al-Qur'an* (Hari Akhir Menurut al-Qur'an), *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam* (Keadilan Sosial dalam Islam), *Fi Zhilal al-Qur'an* (Tafsir Di Bawah Naungan al-Qur'an), *As-Salam al-'Alamiy wa al-Islam* (

Islam dan Perdamaian Dunia), *Al-Mustaqbal li hadza ad-Din* (Masa Depan Agama Islam), *Hadza al-Din* (Inilah Islam), *Al-Islam wa Musykilat al-Hadharah* (Islam dan Problem-Problem Peradaban), *Khasha'ish al-Tashawwur al-Islamiyy wa Muqawwimatuhu* (Karakteristik Konsepsi Islam), *Ma'alim fi ath-Thatiq* (Petunjuk Jalan), *Ma'rakatuna ma'al Yahud* (Benturan Kita dengan Yahudi), *Dirasah Islamiyyah* (Studi Islam), *Nahwa Mujtama' Islamiy* (Masyarakat Muslim), *Al-Naqd al-Adabiy: asaluhu wa manahijuhu* (Kritik Sastra: Prinsip Dasar dan Metode-Metode), *Ma'rakah al-Islam wa ar-Ra'sumaliyah* (Benturan Islam dan Kapitalisme), *Fi al-Tarikh: fikra wa manahij* (Teori dan Metode dalam Sejarah), *Muhimmat al-Sya'ir fi al-Hayan* (Urgensi Penyair Dalam Kehidupan), *Naqdu Kitab al-Mustaqbal al-Tsaqafah fi Misr* (Kritik Terhadap Buku Masa Depan Peradaban Mesir), *Thifl min al-Qaryah* (Seorang Anak dari Desa), *Al-Asywak* (Duri-Duri).

2. *Pemikiran Politik Sayyid Qutb*

Sayyid Qutb dalam perjalanan sejarahnya dapat dikatakan sebagai seorang fundamentalis Islam semisal Hasan al-Bana, al-Maududi, dan Muhammad Ghazali, yang mengecam nasionalisme: linguistik, etnis maupun liberal. Fundamentalisme Islam adalah gerakan yang relatif moderen, namun gerakan ini memiliki doktrin yang berakar dari periode awal sejarah muslim. Mereka memiliki semangat untuk melakukan pembaharuan, untuk kembali kepada kemurnian, mewujudkan kebenaran dan kesederhanaan zaman Rasulullah. Dalam idiologi gerakan ini terdapat unsur keyakinan yang kuat, namun karakter yang khas dari gerakan fundamentalis adalah skripturalisme berciri khusus. Seperti apa yang diungkapkan Hasan al-Bana dan pengikutnya yang menegaskan kembali visi Islam yang komprehensif yang meliputi kehidupan politik, sosial dan ekonomi: "Islam adalah iman dan ritual, negara (*wathan*) dan kebangsaan, agama dan negara, spritual dan amal, al-Qur'an dan pedang." Namun, dalam pemikiran Qutb sendiri telah terjadi pergeseran-pergeseran dalam bidang politik dan pemerintahan. Dalam karyanya keadilan sosial dalam Islam yang diterbit sekitar tahun 1949 ada tiga dasar keadilan sosial yang dikemukannya yaitu: kebebasan berkehendak

secara mutlak, persamaan manusia secara keseluruhan, jaminan sosial yang kuat.²⁶ Sebelum sampai pada penjelasan mengapa tiga dasar keadilan sosial dalam Islam harus ditegakan, Qutb menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang keutamaan-keutamaan Islam sebagai agama. Ia mengatakan bahwa aturan kehidupan manusia tidak akan tegak hingga manusia saling bahu membahu dan berusaha memegang teguh jalan Allah dan syari'at-Nya.

Pada kesimpulan tentang kebebasan berkehendak, Qutb menyatakan bahwa kebebasan ini adalah salah satu asas dari rukun untuk membangun keadilan sosial dalam Islam, tetapi kebebasan ini adalah dasar yang paling fundamental untuk menegakan bagian-bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Dalam penjelasannya tentang kebebasan ia memulai dengan pernyataan bahwa Islam memulai dengan membebaskan manusia dari menyembah sesuatu selain Allah dan dari ketundukan kepada sesuatu selain Allah. Maka tidak ada ketundukan kepada selain Allah termasuk juga pada penguasa.

Berangkat dari kebebasan berkehendak tersebut, kemudian manusia diakui persamaannya. Pada dasarnya Qutb mengakui adanya persamaan manusia karena semua jenis manusia adalah mulia, namun dalam pembahasan selanjutnya ia mengatakan dalam lingkup muslim bahwa persamaan laki-laki dan perempuan terdapat pada jenis dan hak-hak kemanusiaan yaitu *diniyyah*, *ruhiyyah* dan persamaan untuk berhak mendapatkan harta warisan, sedangkan dalam persoalan bagian harta warisan, kesaksian dan kepemimpinan mereka berbeda. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa keadilan sosial dalam pandangan Qutb tidak diartikan sebagai keadilan yang merata, tetapi keadilan proporsional. Karena pada dasarnya dalam persoalan keadilan akan kita temukan dua macam yaitu keadilan merata dan keadilan yang tidak merata, tetapi dalam kondisi atau konteksnya dapat dikatakan adil. Apabila kedua hal tersebut di atas telah ditempuh, maka kemudian jaminan sosial bagi masyarakat akan kuat. Dengan demikian, keadilan masyarakat dalam Islam akan terwujud.

Pemikiran Qutb yang orisinal tentang Islam, pertama, ia berpendapat bahwa al-Qur'an sesungguhnya telah menghimpun segala sesuatu yang dibutuhkan

manusia. Islam adalah ajaran yang komprehensif dan satu kesatuan yang homogen.

Ia adalah anti modernisme dan menolak pandangan bahwa Islam harus belajar dari Barat mengenai pembangunan masyarakat dan politik. Ajaran Islam tentang hubungan kemasyarakatan dan pranata sosial yang dijelaskan dalam fikih bukanlah bersifat baku; keduanya bisa diadaptasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam memahami al-Qur'an, Qutb berada dalam tradisi revelasionisme (wahyu) murni, tetapi ia memberikan sebuah makna baru bahwa pemahaman langsung, personal dan intuitif disertai bantuan agama, ia bisa mencapai pemahaman yang memadai tentang alam semesta. Sama halnya "teori politik berdiri atas dasar nurani, bukan hukum."

Sebelum menjelaskan tentang sikap politikya, Qutb memulai dari melihat persoalan politik yang sudah berkembang terutama di Mesir. Menurutnyanya kehidupan dunia sekarang berada dalam kondisi "*jahiliyyah*" kondisi jahiliyyah ini muncul karena telah melampaui batas dasar-dasar kedaulatan Allah di bumi yaitu *al-hakimiyyah*.

Tidak hanya seperti masyarakat *jahiliyyah* awal, bahkan "*jahiliyyah* moderen" ini lebih buruk lagi. Semua sendi kehidupan menggambarkan ke-*jahiliyyah*-an yaitu pemikiran dan seni, konstitusi dan perundang-undangan, budaya dan pemerintahan jauh dari *manhaj Allah* dalam prakteknya.

Tentang teori pemerintahan di dalam Islam, Qutb mengatakan bahwa tegaknya teori pemerintahan dalam Islam atas dasar kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah ta'ala mewakili *al-hakimiyyah* (kedaulatan) dalam kehidupan manusia adalah dengan cara menyerahkan urusan mereka pada kehendak-Nya dan takdir-Nya dari satu sisi, dan dengan cara mengatur posisi, kehidupan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, hubungan-hubungan, ikatan-ikatan dengan syari'at-Nya dan *manhaj*-Nya di sisi lain. Dalam aturan Islam tidak mengakui keesaan Allah, tidak berada dalam kehendak dan takdir Allah dan tidak berada dalam *manhaj* dan syari'at Allah maka ia syirik atau kafir. Karena mengakui bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah

merupakan fondasi paling utama (*rukn al-Islam al-awal*), maka agama tidak akan bangkit dan tidak akan terpenuhi hingga landasan ini terwujudkan. Qutb ingin mengatakan bahwa untuk menegakan pemerintahan yang pertama kita harus menegakan agama terlebih dahulu, karena ini adalah landasan paling mendasar. Tidak ada perbedaan antara penegakan Negara dan agama.

Gagasan politik Qutb yang cukup fundamental adalah menyerukan agar terciptanya pemerintahan Islam yang bersifat menyeluruh atau supranasional.

Walaupun bukan dalam istilah imperium, namun pemerintahan tersebut memiliki pusat pemerintahan dimana mencakup daerah-daerah Islam di luarnya dan warganya memiliki persamaan hak dan kewajiban dengan warga di pusat pemerintahan serta tidak diperlakukan sebagai negara jajahan. Konsep ini mengusulkan agar seluruh umat Islam yang berada dalam pemerintahan tersebut meninggalkan fanatisme ras dan kedaerahan.

Kemudian yang paling radikal dari pemikiran Qutb, ia menegaskan bahwa dimana ditemukan masyarakat muslim, yang menyerupai di dalamnya *manhaj* Allah, maka Allah memberikan hak untuk bergerak dan maju untuk menyelamatkan atau mengambil kekuasaan dan menentukan pemerintahan.

Menurut Qutb pemerintahan Islam harus mendasarkan pada tiga asas politik yaitu keadilan penguasa, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat. Keadilan penguasa di sini, lebih menyoroti pada pribadi penguasa yang harus adil secara mutlak dalam kebijakan dan keputusan tanpa pandang bulu. Ketaatan rakyat pada penguasa adalah merupakan kepanjangan dari ketaatan kepada Allah dan rasulnya. Namun ketaatan di sini bukan karena jabatan tetapi karena mereka menegakan syari'at Allah dan Rasul-Nya. Batasan ketaatan kepada *ulil 'amri* bukan pada kelembagaannya tetapi apakah penguasa menjalankan syari'at Islam atau tidak. Melaksanakan syari'at Islam adalah tawaran mutlak yang harus ada pada penguasa sekalipun sistem pemerintahan yang dijalankan berbeda-beda.

Menurut Hamid Enayat, Qutb memiliki pandangan yang mendekati holistic mengenai masalah negara Islam. *Pertama*, baik Islam maupun sosialisme adalah sistem pemikiran dan kehidupan yang sama-sama komprehensif yang tidak bias

dipecah belah, namun keduanya terpisah satu dengan yang lain. Karenanya kedua sistem ini tidak bisa dirujuk atau disintesiskan. *Kedua*, iman yang sejati dalam Islam dari kepasrahan mutlak kepada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Sehingga pengagungan kepada pribadi yang berkembang di bawah sosialisme Mesir adalah tidak Islami. *Ketiga*, dalam alasan gagasan, pilihan yang real saat ini terletak pada Islam dan *jahiliyyah*. *Keempat*, sosialisme -sama juga dengan kapitalisme dan komunisme- adalah pertumbuhan dari pemikiran *jahiliyyah* dan karenanya membawa serta watak aslinya yang rusak. *Kelima*, sosialisme Mesir berkaitan erat dengan nasionalisme keyakinan *jahiliyyah* lain yang sangat bertentangan dengan jiwa Islam. Dengan demikian, Qutb menyerukan adanya rekonstruksi dan regenerasi spritual, agar setiap orang memperhatikan kesalahan imannya dan keselarasan iman dan perilaku hidup.

Selanjutnya Qutb berpendapat bahwa kelompok yang menentang Islamisasi masyarakat dan negara, terutama mereka yang dianggap pemimpin muslim, harus diperlakukan layaknya kaum *jahiliyyah* (pagan, kafir, murtad), sehingga dibolehkan untuk melakukan kekerasan demi melawan rezim semacam ini. Siapa saja yang tergolong masyarakat *jahiliyyah* ini? Qutb menjelaskan bahwa mereka adalah semua masyarakat yang selain masyarakat muslim. Dengan demikian, semua masyarakat di muka bumi adalah masyarakat *jahiliyyah*, termasuk juga masyarakat Yahudi dan Nasrani dan mereka yang mengaku muslim tetapi tidak menjalankan *manhaj* Islam.

Adapun tahapan jihad dalam Islam menurut Qutb memiliki ciri sistem pergerakan: *pertama*, *waqi'iyah jiddiyah* "sesuai realitas, tetap menampilkan keseriusan". Gerakan Islam bertugas menghadang *jahiliyyah* pada sektor akidah yang berdiri di atas sistem riil dan aplikatif, serta ditopang oleh kekuasaan yang memiliki kekuatan finansial. Upaya pelurusan akidah dan persepsi ini dihadapi dengan dakwah dan penjelasan. *Kedua*, *waqi'iyah harakiyyah*, "sesuai dengan realitas, tetapi selalu dinamis". Islam adalah gerakan yang memiliki tahapan-tahapan. Orang-orang muslim banyak mengalami kekalahan *ruhiyyah* dan *aqliyyah* karena mereka beranggapan bahwa jihad dalam Islam hanya untuk mempertahankan diri. Mereka ini berada di bawah tekanan realitas yang

menyedihkan di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak tersisa lagi Islamnya kecuali nama. Padahal, *manhaj* Islam bertujuan untuk menghapus segala bentuk *thagut* yang ada dimuka bumi dan mengajak manusia agar hanya menyembah kepada Allah. *Ketiga*, gerakan Islam adalah tetap, tetapi sarananya bisa berubah-ubah, dengan catatan tidak keluar dari kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dan tujuan yang telah digariskan. *Keempat*, adanya kriteria syari'at dalam hubungan antar masyarakat muslim yaitu wahyu pertama ditujukan kepada nabi untuk membaca dengan menyebut nama Tuhan sebagai tanda awal kenabian, kemudian Allah mengumumkan kenabian dengan perintah-Nya "*iqra*" dan mengumumkan kerasulnya dengan "*ya ayyuhal muddastir.*" Kemudian Allah memerintahkan Nabi untuk menyebarkan peringatan kepada kerabat dekat. Kemudian memberikan peringatan kepada kaumnya. Kemudian kepada orang yang bertetangga dengan jazirah Arab, kemudian kepada orang Arab secara keseluruhan dan kemudian kepada seluruh alam. Kaidah ini bersifat universal dan dakwah ini tidak boleh berhenti karena adanya sandungan sistem politik atau kekuatan materi.

B. Gamal Abdel Nasser

1. Biografi

Nama lengkapnya adalah Gamal Abdel Nasser (selanjutnya dipanggil Nasser), ia lahir di Iskandariah pada tanggal 15 Januari 1918, dan meninggal pada tahun 1970 akibat serangan jantung. Nasser berasal dari keluarga biasa, dia putra seorang petani yang merangkap sebagai pegawai rendah di kantor pos setempat. Masa kecilnya termasuk anak yang beruntung dibanding remaja pada umumnya yang hanya mengenyam pendidikan rendah saja.

Meskipun dari keluarga petani, Nasser dapat mengenyam pendidikan sampai pada tingkat tertinggi, yaitu pada Akademi Militer (Akmil), sebuah sekolah yang tak mudah dimasuki orang papan bawah (*grassroot*) pada saat itu. Masyarakat Mesir pada saat itu terkenal sebagai masyarakat yang berkelas dan sennatiasa menjaga jarak antar tingkat sosial dan kekayaan.

Sebagaimana terjadi pada negara yang berbentuk kerajaan, pada umumnya jarak antara raja dengan rakyat sangat jelas, dimana kaum bangsawan dengan

rakyat biasa terdapat perbedaan, seperti dalam hubungan tata sosial, kemudahan mengakses pendidikan. Semuanya dibatasi oleh jarak yang ketat, sehingga pada akhirnya mempersulit kaum *marginal* memperoleh akses tersebut.

Kenyataan seperti di atas juga terjadi pada bangsa Afrika pada awal abad XX, dimana mereka hidup dalam wilayah kerajaan yang otoriter. Oleh karenanya, perbedaan sosial sangat nyata dalam bernegara. Dalam bidang pendidikanumpamanya, capaian pendidikan seseorang diukur dari garis kebangsawanan dan derajat kepangkatan. Mereka yang bukan dari kalangan bangsawan tidak dapat mengakses secara bebas. Hal inilah yang menimbulkan kesulitan bagi kaum rendahan untuk memasuki dunia pendidikan pada level tertentu, seperti pada akademi kemiliteran. Oleh karenanya, muncullah ketidakpuasan di kalangan masyarakat luas dalam bentuk pembrontakan dan kekacauan.

Selain terkungkung oleh aturan kerajaan, situasi dan kondisi pada awal abad 20 juga dikenal dengan masa kolonialisme di benua Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Pada saat itu masyarakat berada dalam cengkeraman kekuasaan kolonialisme Eropa. Oleh karenanya, seluruh aktivitas sosial politik amat ditentukan oleh kaum penjajah. Dengan demikian masa kehidupan Nasser berada dalam cengkeraman feodalisme kerajaan dan penjajahan bangsa Barat. Kondisi seperti itulah yang mengilhami gerakan pembaruan Gamal Abdel Nasser hidup.

Adapun latar belakang pendidikan Nasser dimulai dari madrasah, kemudian melanjutkan ke sekolah tradisional yang ditempuh masyarakat pada umumnya. Dimulai dari Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtida'iyah, Madrasah Tsanawiyah, dan setamat dari Madrasah Tsanawiyah ia melanjutkan pada *Kulliyah al -huquq* (Fakultas Hukum) Akan tetapi, ia tidak melanjutkan sampai selesai di fakultas tersebut. Nasser pindah ke *Kulliah al-Harabiyah* (Akademi Militer) sampai selesai. Bahkan mendapatkan prestasi dengan predikat *jayyid jiddan* (*summa cumlaude*) pada tahun 1938.

Dengan melihat *background* pendidikan di atas, tampak bahwa ia telah menempuh pendidikan melalui dua jalur yang berbeda visinya, yaitu jalur tradisional dan modern kemiliteran. Hal ini sangat menguntungkan bagi seseorang

yang mampu menggabungkan antara dua hal yang berseberangan tersebut. Di satu sisi seseorang mampu mengenyam keilmuan tradisional yang bermanfaat bagi kepribadian keislaman. Di sisi lain, mereka akan mampu mengelola negara secara modern sebagaimana *trend* yang terjadi di negara Eropa.

Jika memerhatikan pengalamannya dalam bidang politik, sebenarnya sejak kecil sudah terbiasa berkecimpung di dunia tersebut. Nasser sering mengkoordinir kawan-kawannya melakukan aksi unjuk rasa terhadap pemerintah kolonial. Suatu misal, pada tahun 1933 Nasser melakukan demonstrasi anti penjajah, karena dianggap terlalu mencampuri urusan dalam negeri bangsa itu. Akan tetapi, upaya yang dilakukannya mengalami kegagalan, karena tidak didukung *skill* dan *power* yang memadai. Oleh karenanya, ia bermaksud memasuki dunia militer sebagai bahan yang handal dalam melakukan perubahan. Untuk itu dia sangat berhasrat memasuki dinas militer dengan tujuan agar dapat berbuat banyak demi terwujudnya perubahan Mesir, yang tidak lain adalah kemerdekaan.

Setelah tamat dari Akademi *al-Harabiyyah* (Akademi Kemiliteran Mesir) pada tahun 1939, Nasser beserta kawan seperjuangannya memasuki dinas militer. Dia terpilih menjadi anggota pasukan tentara khusus (*passus*) Mesir yang bertugas di Madi (dekat Kairo). Di sana dia membangun jaringan dengan Anwar Sadat, salah satu tokoh militer saat itu yang kelak menjadi presiden penggantinya. Setelah di Madi, setahun kemudian Nasser ditugaskan di Sudan sebagai perwira militer.

Kemudian pada tahun 1942 ia kembali ke Mesir, menggantikan Anwar Saddath sebagai perwira militer karena Saddath ditahan. Setahun kemudian (1943) Nasser menjadi tenaga pengajar di *Kulliyah al-Harabiyah* hingga tahun 1949. (Alan R. Taylor: 45). Pemberian jabatan tersebut sangat berperan bagi dirinya dalam menggerakkan masyarakat di sana. Sebab, peranan militer sangat dominan dalam struktur pemerintahan saat itu. Oleh karenanya, pada hakekatnya dialah menjadi tulang punggung bangsa Mesir pada saat itu.

Peranan perjuangan Nasser sangat nampak setelah menjadi panglima militer. Pada tahun 1948 tatkala terjadi perang Arab-Israel, Nasser bermaksud membantu Palestina bergabung dengan para pejuang setempat di bawah komando Imam

Besar Masjid al-Aqsa, tetapi maksudnya tidak dikabulkan pemerintah sehingga tak tercapai. Upaya ini tidak berhenti di situ, setelah dia menjadi presiden Mesir, beserta negara tetangga di Timur Tengah mengumumkan perang melawan pendudukan Israel.

Peristiwa di atas yang menyebabkan ia mulai berperan penting dalam perdamaian dan kemajuan di negara Arab. Maka ide dan gerakannya selalu menjadi panutan masyarakat di sekitar Timur Tengah (*Middle East*). Namun sebaliknya bagi Negara barat yang lain, semangat untuk menggelorakan anti Israel mendapat reaksi keras bangsa barat saat itu. Akibatnya, banyak program perekonomian Nasser yang disandera bangsa Eropa. Oleh karenanya untuk mengembangkan pembangunan bidang ekonomi Nasser merasa kesulitan dalam pembiayaan.

Sebagaimana penulis sebutkan di atas, walaupun mereka mengalami kekalahan hingga terjadi gencatan senjata tahun 1948 nama Nasser kian harum. Kemudian, ketika masa pendudukan Israel terhadap Palestina, sebagian Yordania, dan daratan Sinai (Mesir), sekitar tahun 1948 hingga 1951, situasi di Mesir kian memanas. Apalagi adanya campur tangan pemerintah Inggris dalam pemerintahan semakin kuat, terutama melalui perjanjian “British Protokol” tahun 1951, bangsa Arab semakin terdesak.

Di sisi lain, konflik dalam internal juga mulai kelihatan, pada saat itu terjadi pertentangan antara pemerintah dengan kelompok *Ikhwanul Muslimin*, sebuah organisasi social keagamaan radikal bahkan kelompok tersebut dituduh terhadap peristiwa pembunuhan atas diri *Salim Zakky Pasya*, inspektur kepolisian Kairo pada waktu itu. Situasi semakin memanas dalam tahun yang sama setelah Perdana Menteri Nuqrasyi Pasya terbunuh. Akibatnya pada tanggal 12 Februari 1949 pemerintah membubarkan *Ikhwan al-Muslimin*.

Ikhwan al-Muslimin adalah organisasi dakwah yang didirikan oleh seorang ulama kharismatik bernama Syekh Hasan al-Banna dengan maksud dan tujuan untuk menyiarkan ajaran Islam dan melaksanakan tegaknya syariat Islam di kalangan bangsa Mesir dan sekitarnya. Mereka merasa gerah akibat westernisasi Barat di Negara Timur Tengah yang mengakibatkan lunturnya semangat menjalankan syariat Islam di kalangan umat Islam.

Semenjak tahun 1951, Nasser dengan pasukan “Tentara Bebas”-nya melakukan unjuk rasa dimana-mana terutama menentang penjajahan “British Protokol” yang dianggap merugikan rakyat. Mereka menuntut Perdana Menteri Nahas Pasya (pengganti Nukrasyi yang terbunuh) untuk membatalkan perjanjian. Kemudian pada tahun 1952 tepatnya tanggal 23 Juli, terjadilah kudeta militer yang dilakukan Nasser beserta kelompok “Tentara Bebas”-nya menggulingkan Raja Faruq dan mengubah Mesir dalam bentuk negara republik hingga saat ini.

Selanjutnya, Nasser mengangkat Jenderal M. Naquib menjabat Presiden Mesir, sedangkan ia menjadi perdana menterinya. Dalam perkembangannya mengelola pemerintahan terjadi perbedaan pendapat dengan Naquib, maka setahun kemudian (1954) presiden Naquib diturunkan, akhirnya dia mengangkat dirinya menjadi presiden dan perdana menteri Mesir. Sejak itulah ia menjadi penguasa tunggal di Negara itu.

Pada tahun 1954, tepatnya tanggal 2 April, dia merintis gerakan *Pan Arabisme* dengan membentuk Pakta Baghdad beserta Turki dan Pakistan dengan tujuan membendung issue invansi Soviet yang sedang mengganas. Dua tahun selanjutnya (1956), menasionalisasikan Terusan Suez dan perusahaan asing dan swasta di Mesir. Semenjak itulah Nasser menjadi pemimpin bangsa Arab. Akibatnya memaksa dia berhadapan dengan asukan asing di sana.

Untuk mewujudkan semangat nasionalisme Arab itu dia membentuk Republik Persatuan Arab (RPA) beserta Syuria pada tanggal 12 Januari 1958. Nasser terpilih sebagai presidennya. Adapun RPA dimaksudkan untuk merealisasikan idenya, namun usahanya tidak berhasil karena terjadi perbedaan pendapat di antara anggotanya. Di samping itu Arab Saudi tidak menyetujuinya, diapun berkeinginan menjadi pemimpin bangsa Arab.

Setelah usaha mendirikan negara persatuan Arab tak berhasil, tahun 1962 Nasser mengarahkan perhatiannya terhadap suksesi di Yaman. Ketika itu terjadi kudeta oleh kolonel Muhammad Sallal terhadap Raja Muhammad Badar. Nasser menyokong pemberontakan tersebut, sementara Raja Faisal (Arab Saudi) pun tidak menutup mata. Saudi ikut membantu rezim yang berkuasa. Dalam kudeta

tersebut penguasa sempat tergulingkan, sehingga lebih menambah citra Nasser di mata bangsa Arab. Sementara di sisi lain Nasser berhadapan dengan Raja Faisal.

Pertikaian antara Presiden Nasser dengan Raja Faisal dari Saudi tidak berlangsung lama hingga meletus perang Arab-Israil pada tahun 1967. Ketika itu muncul persatuan seluruh bangsa Arab untuk melawan agresi militer Israel. Mereka bersatu melawan kebrutalan tentara Yahudi. Sayangnya, dalam pertempuran tersebut bangsa Arab mengalami kekalahan dan memaksa wilayah mereka seperti Mesir, Yordania, dan Palestina dicaplok Israil. Akibat kekalahannya, setahun kemudian (1968) Nasser melakukan serangan balik terhadap Israel sampai tahun 1969.

Kekalahan dalam perang Arab-Israel menurut bangsa Mesir disebabkan bangsa Arab tidak bersungguh-sungguh melawan Israil. Mereka hanya melakukan perang setengah hati, hal ini terbukti dari sikap para pemimpinnya kurang tegas. Menurut Nasser, mereka kurang bersatu dalam meghadapai Israel. Hal ini disebabkan karena setelah hilangnya kekhalifahan dalam Islam muncul ketegangan antara tiga negara besar, yaitu Saudi Arabia, Mesir, dan Turki. Padahal, peranan ketiga negara tersebut sangat besar dalam mewujudkan kekuatan umat Islam.

Dampak kekalahan bangsa Arab meyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam pada umumnya. Mereka mengambil jalan sendiri-sendiri, bahkan menuduh gerakan nasionalisme Nasser tidak Islami, dan membentuk ideologi Islam sebagai pemersatu bangsa Arab pada pokoknya serta umat Islam pada umumnya.

2. Pemikiran Politik Gamal Abdel Nasser

Pemikiran Nasser, menurut para pengamat Timur Tengah, berkembang pada tiga lingkaran besar meliputi Afrika, Arab, dan Islam, yang disebut dengan Nasserisme Artinya, untuk menjelaskan pemikiran keislaman Nasser memang tidak sepenuhnya bisa diamati secara eksplisit. Pemikiran keislaman tersebut sudah termasuk di dalam gagasan-gagasan Nasserisme itu sendiri. Gagasan-gagasan Nasser tersebut menurut pengamat Timur Tengah meliputi pan-Arabisme dan sosialisme Arab. Berikut pemaparan masing-masing istilah tersebut dan

penjelasannya terkait dengan tiga lingkaran besar garis perjuangan Nasser: Afrika, Arab, dan Islam.

a. *Pan-Arabisme*

Ketika membahas ideologi pan-Arabisme Nasser, pertama-tama harus diakui bahwa pan-Arabisme yang digerakkannya bukanlah seutuhnya merupakan kreativitasnya. Sebagaimana disinggung di muka bahwa sejarah nasionalisme Arab telah muncul sejak abad sebelumnya, dan melibatkan banyak tokoh dalam sejarah dunia Arab. Selain itu, Nasser dipengaruhi oleh pembacaannya mengenai riwayat hidup para tokoh nasionalis sebelumnya, yang selanjutnya gagasan-gagasan nasionalisme mereka digerakkannya dalam konteks yang lebih bermakna, yaitu ketika kolonialisme semakin mengancam eksistensi, identitas, dan keamanan negeri-negeri Arab.

Selain itu, *kedua*, kajian mengenai karakteristik pan-Arabisme ini, dapat dipilah tiga unsur ideologi politik pan-Arabisme Nasser, yaitu unsur nasionalisme; unsur Arabisme; dan unsur pan-Arabisme. Pemilahan unsur-unsur ini dimaksudkan agar dapat dibedakan karakteristik Nasser sebagai seorang nasionalis di dunia Timur Tengah Arab; Nasser sebagai seorang penganut dan pejuang Arabisme; dan Nasser sebagai pendekat pan-Arabisme.

Identitas Nasser sebagai seorang nasionalis dimulai sejak dari keterlibatannya dalam kelompok Perwira Bebas sampai dengan revolusi Juli 1952. Nasser sebagai penganut Arabisme adalah segera setelah revolusi sampai terjadinya perang Arab-Israel tahun 1956, yang ketika itu Israel menyerbu Mesir bersama pasukan Inggris dan Prancis yang kemudian dikenal dengan *Tripartite Aggression*. Arabisme Nasser pada tahap ini masih berupa kesadaran bahwa Mesir merupakan bagian dari dunia Arab, dan identitas dunia Arab ini berbeda dengan identitas Barat yang asing dan bercokol di dunia Arab. Dan, Nasser seorang pan-Arabis dimulai pada pascaperang Arab-Israel tahun 1956 itu, yakni ketika Nasser menyerukan persatuan Arab dalam rangka melawan imperialisme dan kolonialisme Barat di dunia Arab. Bisa juga dikatakan bahwa tahapan terakhir ini berawal dari mulainya pemerintahan Nasser membawa Mesir kepada percaturan dunia internasional,

ketika Nasser mengembangkan kebijakan luar negerinya dalam rangka persatuan dunia Arab dan menjaga keamanan Arab dan ancaman Barat.

Pembagian karakteristik di atas semata-mata bersifat arbitrer, karena batasan-batasannya yang jelas tidak bersifat absolut, dan boleh jadi sebagian saling melingkupi. Selain itu, ketiga karakteristik yang terbedakan itu boleh jadi justru bersifat kontinum sekaligus menambahkan unsur baru dalam perkembangan selanjutnya. Ini berarti bahwa perkembangan baru tidak menghilangkan karakter lamanya. Jadi, dalam tahapan perkembangan pan-Arabisme, di dalamnya terdapat pula unsur-unsur nasionalisme dan Arabisme.

Pan Arabisme, sebagai ideologi politik, yang diperjuangkan dan dikembangkan oleh Gamal Abdul Nasser mempunyai beberapa karakteristik ditinjau dari segi dasar, tujuan atau orientasi, dan cara memperjuangkannya. Dalam sejarahnya pan-Arabisme mengambil dasar bagi penyatuan Arab, yaitu dasar geografis, dasar bahasa, dasar kultural, dasar sejarah, dan dasar pengalaman empiris yang sama.

Dalam sejarah karir politiknya, Nasser, bagaimanapun, memulainya dari pejuang nasional-berarti menempuh jalur nasionalisme-Mesir. Dalam mata rantai perjuangan nasional Mesir, Nasser muncul pada mata rantai paling kontemporer. Pengalaman Mesir yang diduduki dan dijajah oleh Inggris membuatnya geram. Lebih sengit lagi, kegeraman Nasser diperparah oleh perilaku elit penguasa Mesir yang sebenarnya hanyalah boneka Inggris. Inilah titik tolak seluruh perjuangan politik Nasser. Begitu Nasser berkuasa, ia dengan berbagai cara berupaya menyapkan praktik imperialisme dan- kolonialisme di Mesir. "Bahkan, dalam perkembangan selanjutnya, Nasser meluaskan kiprah politiknya hingga ke wilayah yang lebih luas, yaitu wilayah Arab. Dan, pada suatu ketika, Nasser mengimpikan peranannya dan peranan Mesir dalam tiga lingkaran, yaitu Asia, Afrika, dan Islam.³

³ Keinginan-atau lebih tepat ambisi-Nasser untuk berkiprah di dalam tiga lingkaran: Afrika, Asia, dan Islam tergambar jelas pada tulisannya *Falsafat al-Tsaurah* (Filsafat Revolusi). Lihat Gamal Abdel Nasser, *The Philosophy of Revolution*, dalam Silvia G. Haim, ed., *Arab Nationalism: An Anthology* (Berkeley, Los Angeles: Univ. Of California Press, 1964), h. 229-232.

Sebagai pemimpin puncak di Mesir-bagian terpenting dalam percaturan politik-ekonomi dunia Arab-Nasser pada mulanya berjuang dalam wilayah nasionalnya- dan dengan memanfaatkan segala daya yang dimiliki oleh negerinya- mengusir kolonialisme dan imperialisme Inggris dan Prancis. Tonggak-tonggak imperialisme di dalam negeri dihancurkan, dan terakhir pada 26 Juli 1956 Nasser menasionalisasikan Perusahaan Terusan Suez milik Inggris dan Prancis. Tiga dan empat bulan berikutnya tiga kekuatan: Inggris, Prancis, dan Israel menggempur Mesir, dan Mesir kalah kendatipun bekerjasama melakukan pertahanan dengan Yordan dan Suriah. Sebelum peristiwa ini, Nasser menyerukan agar negara-negara Arab bersatu dan berhati-hati dengan program imperialis untuk memecah belah dunia Arab, sebagaimana telah terbukti dengan berdirinya negara Israel.

Keterpecahan dunia Arab yang berakibat tidak mampunya Arab membendung berdirinya Israel tahun 1948, dan berkoalisinya Israel dan imperialis, merupakan momok yang selalu menghantui pikiran-pikiran Nasser. Nasser sepenuhnya menyadari ancaman ini bagi stabilitas dunia Arab. Mesir tidak mungkin hanya memperhatikan diri sendiri, berjuang untuk diri sendiri, tanpa menoleh kepada Arab secara keseluruhan. Dengan demikian, Mesir harus membuka diri ke arah dunia Arab. Nasser mulai memasuki percaturan internasional yang dimulai dengan memasuki kawasan Arab. Dia mulai percaya kepada kekuatan opini dunia internasional, terutama di Afrika dan Asia, pada peristiwa-peristiwa di PBB dan pada peranannya dalam krisis Suez. Ketika berbicara di Iskandariyah, pada Juli 1957 di Ulang Tahun Pertama nasionalisasi Perusahaan Terusan Suez, ia menegaskan,

“Diamnya negeri Arab mana saja akan memicu diamnya negara' Arab pada PD I, dan sebelumnya... ketika negeri-negeri Arab saling berbenturan dalam menghadapi negara asing yang mengontrol dan menguasainya...dan setelah penguasaan atas negeri-negeri Arab itu...berlanjutnya penguasaan itu, terus menerus...di antara harapan-harapan komunitas Arab (*al-Ummah al-Arabiyyah*). Sesungguhnya tujuan kita satu, dan perjuangan kita untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan di negeri Arab manapun, telah mempengaruhi kita dalam keseluruhan wilayah dunia Arab.”⁴

⁴ Gamal Abdul Nasser, Pidato, 21 April 1959.

Dalam keterkaitan dan kebersamaan dunia Arab itu, menurut Nasser, setiap aksi pertahanan negeri Arab akan berarti pertahanan seluruh Arab. Dan, stabilitas atau keamanan dalam negeri masing-masing tidak berarti apa-apa kecuali stabilitas dan keamanan serupa terjadi pada bagian lain dunia Arab secara keseluruhan. Nasser menekankan hal ini dalam beberapa pidatonya,

Ketika kita berbicara mengenai masyarakat bangsa Arab (*al-Qaumiyah al-Arabiyyah*), kita telah mengetahui sejarah, bahwa stabilitas masyarakat bangsa (*al-Qaumiyah*) kita di masa lalu, sebabnya ada pada pemeliharaan kebebasan kita dan pada kemerdekaan kita. Dan, ketika kita bertahan, itu adalah pertahanan negeri-negeri (*wathan*) kita secara keseluruhan....”⁵

Persatuan ini..persatuan dari sudut pandang masalah telah tegak, demikian juga bahwa persatuan ini berdasarkan tujuan bersama. Dan, dari sudut pandang pengalaman masa lalu bersama, ya.. Kesatuan tujuan...kesatuan eksistensi...kesatuan kita sebagai negara Arab. Kita ada dalam ikatan bahwa keamanan kita adalah percuma kecuali keamanan kita berkaitan dengan keamanan negara-negara Arab lainnya. Dan, keselamatan kita percuma kecuali berkaitan dengan keselamatan negara-negara Arab lainnya.⁶

Dan berbagai pernyataan Nasser di atas, jelas sekali bahwa Nasser sangat mementingkan Arabisme, sebuah kesadaran Arab, tidak hanya di Mesir, tetapi juga di negeri-negeri Arab lainnya. Maka, tidak heran jika Nasser terus menerus menyerukan kepada rakyat Mesir untuk menyadari keberadaannya sebagai bagian dari komunitas Arab (*al-ummah al-Arabiyyah*). Di sini Nasser mengatakan, “*Dan kita (orang Mesir) adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Arab (al-ummah al-Arabiyyah) yang satu, sejarahnya satu, perjuangannya satu, tujuannya satu.*”⁷ Arabisme Mesir, menurut pandangan Nasser, adalah sebuah kepastian (*qadar*), sebuah eksistensi (*wujud*).dan sebuah kehidupan (*hayat*).⁸

Nasser merealisasikan ideologi pan-Arabismenya lewat politik persatuan Arab yang diwujudkan dalam bentuk sebuah negara persatuan. Persatuannya dengan Suriah tahun 1958 diberi nama Republik Persatuan Arab, disingkat RPA,

⁵ Gamal Abdul Nasser, Pidato mengenai al-Azqiyah, Oktober 1960.

⁶ Gamal Abdul Nasser, Pidato, 23 Desember 1962.

⁷ Gamal Abdul Nasser, Pidato di Majlis Ummah, 20 Januari 1965

⁸ Gamal Abdul Nasser, Pidato Ulang Tahun Ketigabelas Revolusi, 23 Juli 1965, h. 24.

(*al-Jumhuriyah al-Arabiyah al-Muttahidah, United Arab Republic*). Pembentukan RPA adalah langkah politik organisasional awal dalam membangun struktur politik yang lebih handal dalam mengatasi persoalan bersama Arab. Amat disayangkan, Suriah terpaksa menempuh jalan berbeda dan kemudian memisahkan diri dari RPA, kendatipun kemudian tetap bekerjasama dengan Suriah merdeka.

b. Sosialisme Arab

Sosialisme pada awalnya merupakan filsafat komunalis yang berpendirian pada kesatuan dan keutuhan masyarakat sebagai suatu komunitas. Dalam perkembangan lebih lanjut, sosialisme memasuki wilayah ekonomi sehingga bemuansa politik-ekonomi. Sosialisme Nasser pada prinsipnya merupakan gagasan politik-ekonomi Nasser yang timbul sebagai respon terhadap struktur politik-ekonomi yang mendominasi dunia, yaitu politik ekonomi kapitalisme dan komunisme. Politik ekonomi kapitalisme berkembang di Barat, yang kemudian merasuki wilayah dunia ketiga, serta melahirkan imperialisme Barat atas dunia ketiga, termasuk wilayah-wilayah Timur Tengah, Asia dan Afrika.⁹

Sosialisme Arab Nasser yang bangkit dalam percaturan politik-ekonomi nasional dan internasional adalah untuk menandingi dominasi ideologi kapitalisme Barat dan ideologi komunisme Timur. Sosialisme Arab Nasser dalam kerangka Nasserisme, merupakan kelanjutan dari ideologi nasionalisme Arab, atau pan-Arabisme Nasser. "Keberhasilan" nasionalisme Arab Nasser dalam menegaskan identitas negara-negara Arab dalam pergulatan internasional tidaklah sepenuhnya berhasil mengusir imperialisme Barat atas dunia Timur Tengah, dan dunia Arab khususnya. Maka, ideologi politik-ekonomi sosialisme merupakan pilihan terbuka dalam melakukan perimbangan kekuatan (*balance of power*).

Pada awal perkembangannya, sosialisme Arab Nasser menggerakkan asas-asas sosialisme politik-ekonomi di Mesir pada masa revolusi, agar kekayaan negeri dapat dinikmati oleh sebagian besar rakyat, terutama kalangan petani dan

⁹ Robert H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial* (Terjemahan Alimandan, dari *Perspective on Social Changes*, [1977], Jakarta, Bina Aksara, 1989), h. 271-272.

buruh miskin-sebuah gerakan mengikis berbagai dampak politik, sosial, dan ekonomi yang diakibatkan oleh kolonialisme dan imperialisme.

Sosialisme Arab Nasser merupakan sosialisme tahap kedua dari sejarah perkembangan sosialisme di Timur Tengah Arab Abad 20. Sebelumnya, pada periode pertama, telah muncul banyak tokoh dari organisasi di dunia Arab yang menggagas dan menyuarakan sosialisme. Berbeda dengan nasionalisme Arab yang lebih merupakan respons dunia Arab terhadap bentuk-bentuk imperialisme politik Barat sebagai pemerintahan kolonial, sosialisme Arab merupakan respon terhadap kegagalan nasionalisme Arab ditambah dengan ketimpangan sosial-ekonomi yang disebabkan oleh imperialisme ekonomis Barat di dunia Arab.

Gerakan sosialisme Arab yang paling tua adalah partai Ba'ats, yang diorganisir di Suriah selama PD II. Kelompok ini berasal dari diskusi informal pimpinan Michael Aflaq (lahir 1910),¹⁰ anak seorang saudagar Yunani Ortodoks, dan Salah al-Din Baytar (1911-1980), seorang Muslim Suriah. Kedua tokoh ini dilahirkan di Damaskus, memperoleh pendidikan di Prancis di mana mereka berhubungan dengan partai komunis, dan mengajar selama beberapa waktu di Suriah. Mereka kecewa dengan komunisme, karena mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus dan identitas orang Arab. Mereka juga serta melangkahi para pemimpin nasionalis yang terlebih dahulu di negara mereka, karena mereka mengabaikan perlunya pembaruan politik, sosial, dan ekonomi. Tahun 1942, keduanya mengorganisir partai Ba'ats atas dasar program-program sosialis yang menekankan pembaruan internal serta program-program terpadu bagi seluruh masyarakat Arab. Partai itu menolak pemikiran mengenai perjuangan kelas karena memilah-milah bangsa Arab dan antikomunis.

Karena partai Ba'atslah sosialisme tampil sebagai ideologi yang memiliki ikatan istimewa dengan bangsa Arab. Para pemimpin Ba'ats menekankan bahwa mereka bukanlah pembawa ideologi tetapi sesuatu yang keluar dari tradisi Arab. Tradisi Arab dalam sejarah sangat dekat dengan - sehingga sulit sekali dari dari

¹⁰ Lihat tulisan Aflaq, *Fi Sabil al-Ba'its*, Beirut, 1959, hlm, 29-30, yang salah satunya memuat gagasan nasionalisme dan revolusi. Tulisan itu sendiri dibuat pada tahun 1940. Dikutip dari Silvia G. Haim, Ed., *Arab Nationalism: An Anthology* [Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 1964], hlm. 242-249).

tradisi keberagamaan Islam. Maka, inipun mengandung arti bahwa partai Ba'ats juga menghubungkan sosialisme dengan Islam dalam tradisi Arab. Bagi para pemikir Ba'ats, Islam merupakan bagian dari kesadaran Arab, dan pengalaman Islam yang awal dipandang sebagai revolusi besar Arab pertama dan ajaran-ajarannya mengenai persamaan (*al-musawah, equality*) dan persaudaraan (*al-ukhuwah, brotherhood*) sebagai basis masyarakat sosialis yang sebenarnya. Aflaq meyakini, "bahwa partai Ba'ats, sementara orientasinya sekular, mewujudkan bangkitnya semangat Arab dengan Islam," dan mendorong orang Arab untuk mencontoh kehidupan Nabi Muhammad, karena "Muhammad merupakan simbol bagi semua orang Arab; yang berarti bahwa semua orang Arab sekarang ini dimisalkan menjadi Muhammad-Muhammad baru".¹¹

Boleh dibilang Nasser muncul sebagai penggerak sosialis yang utama di Mesir. Akan tetapi, dari segi organisasi dan bentuknya, gerakan Nasser sangat berbeda dengan partai Ba'ats. Gerakan Nasser bermula dari kelompok informal para perwira militer (yang disebut *free officers, dubbat al-ahrar*, perwira bebas) yang mengambil alih kekuasaan pemerintah Mesir tahun 1952, dan tidak menjadi partai politik formal. Partai Ba'ats menekankan kepemimpinan kelompok, sedangkan Nasser membangun kepemimpinannya di sekitar individu-individu yang kuat. Perbedaan inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan gagalnya persatuan Suriah dengan Mesir tahun 1958-1961 dalam Republik Persatuan Arab, RPA, di samping adanya kenyataan bahwa Nasser dan Ba'ats sama-sama terikat dengan ideal-ideal persatuan Arab. Selain itu, partai Ba'ats menekankan pentingnya pembangunan dan ideologi yang konsisten, sementara Nasser tetap mempertahankan modelnya yang adaptasionisme pragmatis, bahkan selama fase doktrinernya tahun 1960-an.

Dalam Nasserisme, ada penekanan yang kuat pada hakikat indigenisasi (pribumisasi) ideologi dan program-program. Pribumisasi tersebut menekankan Mesir sebagai negara Timur Tengah berkebangsaan Arab yang memiliki warisan

¹¹ Mengenai pandangan ini, lihat Haim, *ibid.*; Cf . Kamel S. Abu Jaber, *The Arab Ba'ath Socialist Party: History, Ideology, and Organization*, Syracuse, New York, Syracuse University Press, 1966, hlm. 129.

Islam yang sangat kental. Dalam menjelaskan sosok Nasser, Voll menyatakan bahwa Nasser merupakan pribadi yang shaleh, praktisi muslim, dan mendorong suatu analisis tentang dasar-dasar Islam bagi sosialisme. Pemikiran liberalis lama dan komunisme dipandang sebagai sesuatu yang asing, dan Islam memberikan peluang awal bagi suatu ideologi sosialis yang mandiri. Islam Nasserisme, bagaimanapun, menolak pemikiran semacam itu serta tradisi intelektual yang diasosiasikan dengan masyarakat tradisional. Dalam sosialisme Arab ini, dimensi Islam menekankan keadilan dan keseimbangan sosial (*al-adalah al-ijtima'iyah*), mencoba melakukan transformasi sosial, dan tidak harus sesuai dengan kelompok konservatif serta fundamentalis di Timur Tengah Arab. Tetapi, bagaimanapun juga, prestasi Nasser adalah sebagai nasionalis revolusioner dan sebagai juru bicara yang menonjol yang telah mempopulerkan pemikiran mengenai Islam yang dikaitkan dengan sosialisme Arab. Dalam Nasserisme, keterkaitan Islam dengan sosialisme Arab tampak saling mempengaruhi.

Sejak Pertengahan 1960-an, sosialisme Arab dengan berbagai bentuknya telah muncul sebagai ideologi yang dominan di Timur Tengah Arab. Nasserisme dan Ba'ats merupakan dua eksponen yang menonjol dari sosialisme Arab itu; walaupun ada gerakan-gerakan lain yang berdasarkan prinsip-prinsip yang sama di wilayah lain. Sebagian besar pembahasan tentang Islam saat itu memperlihatkan masa depan Islam dalam kerangka sosialis Arab. Sementara itu, gerakan-gerakan tradisional, konservatif dan fundamentalis sering dipandang sebagai sisa-sisa peninggalan lama pengalaman Islam yang harus segera menyesuaikan diri dengan kekuatan dinamika baru, atau - kalau tidak- akan menghadapi kehancuran.

Karakter sosialisme Arab Nasser tidak jauh berbeda dengan sosialisme Arab sebelumnya ditinjau dari segi tema-tema perjuangan dan metode penggunaan Islam dalam memberikan legitimasi dan justifikasi doktrin dan perjuangan. Tema-tema yang dibawa Nasser-seperti tema-tema sebelumnya yang dihembuskan oleh Ba'ats - adalah keadilan sosial, transformasi sosial yang radikal bagi masyarakat, serta kekuasaan rakyat atas sumber-sumber ekonomi. Kendatipun Ba'ats dan Nasserisme sama-sama memakai Islam sebagai landasan legitimasi dan justifikasi, Nasser lebih intensif melakukannya dibandingkan dengan apa yang

dilakukan pada periode sebelumnya, sehingga tampak sekali akseptabilitasnya bagi masyarakat Islam. Maka, wajar sekali Esposito hampir selalu memberikan label “Islam”, pada sistem dan gerakan sosialisme Arab Nasser. Esposito sering menyebut istilah sosialisme (Islam) Arab Nasser.

Perbedaan Nasserisme berbeda sekali dengan komunisme, yakni dalam pandangannya terhadap agama. Komunisme mempropagandakan gerakan anti-agama sedangkan Nasser memakai Islam dalam memberikan legitimasi dan justifikasi pandangan dan gerakan sosialisnya. Maka, di sini benar pula pandangan Esposito bahwa dalam konteks nasionalisme Arab, baik Ba'ats maupun Nasser, keduanya menyadari akan arti pentingnya Islam dalam kerangka perjuangan nasionalisme dan sosialisme Arabnya, sehingga mereka menoleh kepada dan memakai Islam. Dalam Nasserisme, pemakaian Islam untuk melegitimasi doktrin-doktrinnya - dalam hal ini program-program sosialisnya - tampak lebih sistematis. Penggunaan Islam ini merupakan karakteristik sosialisme Arab Nasser yang cukup penting dijelaskan. Praktik penggunaan Islam inipun jelas terencana dan terorganisir dengan baik. Ideologi revolusi dikemukakan sebagai inti dakwah Islam, karena Islam dianggap sama dengan sosialisme,¹² dan penyelewengan dari sosialisme dalam Islam adalah suatu sebab kemunduran.

Pernyataan-pernyataan lain mengenai hubungan erat antara sosialisme dan Islam telah menyebabkan timbulnya penafsiran-penafsiran seperti yang mengatakan bahwa seruan Muhammad merupakan jawaban sosialis kepada suatu masyarakat kapitalis di Mekkah yang mempunyai struktur kelas. "Muhammad melarang riba karena hal itu merupakan pernyataan dari sistem kapitalis,¹³ dan dengan demikian memberikan pengertian bahwa al-Qur'an itu mungkin berasal dari manusia dan bukan dari Tuhan. Bahkan, faham sufi dianggap mempunyai akar sosialis oleh pemimpin tarikat-tarikat sufi.¹³

¹² Kamal al-Din Rif'at, Sekretaris Dakwah dan Pemikiran pada Persatuan Sosialis, mengatakan, "Sama sekali tidak terdapat pertentangan antara Islam dan Sosialisme ; Islam sejak permulaan telah menganjurkan Sosialisme, dan sosialisme itu sendiri adalah salah satu prinsip Islam." (*Al-Mulhaq al-Dini, Al-Jumhuriyah*, 11, 1966, h. 152

¹³ Muhammad Atta, dalam *ibid*, 27, 1 Juli 1966, dikutip oleh Salah al-Din al-Munajjid, *Basharat al-Islam*, (Beirut, 1966), hlm. 80.

Di samping bersifat sosialis, Islam juga dikemukakan sebagai ideologi revolusioner. Pada pokoknya dan terutama sekali Islam dianggap sebagai suatu revolusi menentang korupsi,¹⁴ dan revolusi 23 Juli 1953 dikatakan “telah merealisasikan inti dari sisi faham revolusi Islam secara praktis”.¹⁵ Revolusi itu timbul “untuk nilai-nilai spiritual dan menghidupkan kembali warisan keagamaan dari insan Arab.”¹⁶ Memang, Islam tidak hanya dikemukakan sebagai kekuatan revolusioner dan kekuatan pendorong, malahan Nasser berkata bahwa “Islam adalah revolusi”.

¹⁴ Muhammad Mahmud al-Wain, dalam *Mulhaq*, 27, 24 Juni 1966, dilaporkan telah mengatakan, “Semua Sufisme adalah Sosialisme. Pioner Sosialisme dalam Islam adalah Abu Dzar al-Ghifari. Sejarah sufisme dalam berbagai periode sejarah tidak lain dari gambaran sosialisme yang sebaik-baiknya.” (dikutip dari Munajjid, *Balsafat*, h. 82.

¹⁵ Jamal al-Din al-Ramadi, *Mulhaq*, 23 Juli 1966. Dalam nomor yang sama Abdul Halim Dawakhli menulis sebuah tulisan “*al-Islam al-Tsaurah*” (Islam adalah Revolusi) dalam *Mimbar Islam*, 11, 1966, h. 152.

¹⁶ Musthafa Bahjat Badawi, *Mulhaq*, 22 Juni 1966, dikutip dalam *Balsafat*, h. 49, dalam Abdul Hadi, *Pemikiran Keislaman Tokoh Sosialis (Studi Kasus Soekarno Dan Gamal Abdul Nasser)*, *Jurnal Studi Al-Qur'an* Vol. 10, No. 1, (2014), h. .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainal Abidin. *Ilmu Politik Islam*, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Bin al-Jabir, Husain bin Muhammad. *Al-Thariq ila Jama'at al-Muslimin*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tahmid, *Menuju Jamaatul Muslimin; Telaah Sistem Jama'ah dalam Gerakan Islam*. Cet. Ke-4; Jakarta: Robbani Press, 1996.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Cet. Ke-30; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Cholisin, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2003.
- Dwi, Yuliyanto Muhammad. "Strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Klaten sebagai Partai Dakwah dalam Memberikan Pendidikan Politik terhadap Masyarakat " Abangan", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), h. 11. <http://eprints.uny.ac.id/8643> (29 Maret 2018).
- Hamka, "Studi Islam" dalam Abd. Wahid, "Pemikiran Politik dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 9 no. 1 (Januari 2010), h.77. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/1411/1029> (30 Maret 2018)
- Mathar, Moch. Qasim. *Politik Islam dalam Sorotan: Ketegangan antara Pemikiran dan Aksi*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Nasiwan, *Diskursus Antara Islam dan Negara Suatu Kajian tentang Islam Politik*. Pontianak: Yayasan Insan Cinta, 2003.
- Qardhawy, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, terj. Syafril Halim, *Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita Di Dewan Perwakilan Partisipasi Dalam Pemerintahan Sekuler*, (Jakarta: Robbani Press, 1997).
- Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz, *Tarbiyah Siyasah: Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis Evaluatif terhadap Proses Pendidikan Politik "Ikhwan" untuk Para Anggota Khususnya dan Seluruh Masyarakat Mesir Umumnya dari Tahun 1928 hingga 1954*, Solo: Era Intermedia, 2000.

Sardar, Ziauddin. *Islamic Futures*. Terj. Rahroani Astuti, *Masa Depan Islam*, Terj. Rahroani Astuti dengan judul "Masa Depan Islam dalam Muhammad Saleh Tajuddin dkk, *Dunia Islam dalam Lintasan Sejarah dan Realitasnya di Era Kontemporer, Syi'ah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Al-Fikr Vol. 20 No. 2 (Tahun 2016)

Sukardja, Ahmad & Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum: Syariat, Fikih, & Kanun (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

Wahid, Abd. "Pemikiran Politik dalam Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, vol. 9 no. 1 (Januari 2010), h.77. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/ushuluddin/article/view/1411/1029> (30 Maret 2018)

Zawawi, Abdullah. "Politik Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. V, No 1, (Maret 2015), h. 88-89, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2204> (31 Maret 2018).

Zuhraini, "**Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik**", *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2014), h.33. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/639> (30 Maret 2018).

**Pemikiran Politik Islam
PEMERINTAHAN DINASTI UMAYYAH DAN ABBASIYAH**



MAKALAH

Diajukan Pada Seminar/Diskusi Konsentrasi Pemikiran Islam Semester 3
Dalam Mata Kuliah Pemikiran Politik Islam

**OLEH
GALIH SAPUTRA
80100216069**

Dosen Pemandu:

Prof. Dr. Usman Djafar, M.Ag

Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.Ag.

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Agama Islam dari periode Nabi Muhammad saw, sangatlah pesat dan juga baik, sehingga agama suci ini pun dapat mudah diterima di kalangan masyarakat luas. Begitu pula system pemerintahan pada masa Rasulullah, sungguh baik dan bijak, dalam menyatukan berbagai suku-suku dan aliran-aliran agama di tanah Arab. Dengan sistem pemerintahan dengan memunculkan piagam Madinah yang menjunjung tinggi hak-hak tiap manusia, dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga dalam pemerintahan beliau sangatlah dijunjung oleh kaumnya.

Ketika pada pemerintahan *Khulafa al-Rasyidin* pun, yang dimulai dari Abu Bakr al-Shiddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, hingga Ali ibn Abi Thalib pun juga baik, akan tetapi pada masa pemerintahan Utsman ibn Affan di sini, terdapat banyak sekali kegoncangan dalam kekhalifahan, dalam periode ini pun Islam terpecah menjadi beberapa aliran, yang disebabkan afatnya Khalifah Utsman ibn Affan yang belum diketahui siapa pembunuhnya, dan apa motif dari pembunuhannya. Sehingga banyak sekali aliran yang mengeluarkan diri dari persatuan Khalifah, mulai dari aliran Mu'awiyah, Khawarij, Syi'ah, dan masih banyak lainnya. Sehingga Islam pun tidak kembali menjadi satu lagi.

Pada masa peradaban Islam setelah masa *Khulafa al-Rasyidin* yakni pada masa kegemilangan Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, dengan pendirinya adalah Mu'awiyah bin Abu Sufyan, yang kurang lebih beliau memimpin kaum muslimin selama 80 tahun. Dinasti Umayyah dibagi menjadi dua, yakni Dinasti Umayyah I atau biasa disebut Umayyah Timur (661-680) dan Umayyah II atau Umayyah Barat (661-750), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M).

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana proses berdirinya Dinasti Umayyah?
- b. Siapa saja khalifah Dinasti Umayyah?

- c. Siapa saja khalifah Dinasti Umayyah I?
- d. Bagaimana sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah?
- e. Bagaimana perkembangan peradaban pada masa Dinasti Umayyah?
- f. Bagaimana terjadinya keruntuhan Dinasti Umayyah?
- g. Bagaimana proses terbentuknya Dinasti Abbasiyah?
- h. Siapa saja tokoh pada masa Dinasti Ababsiyah yang mempunyai peran penting dalam menggulingkan Dinasti Umayyah?
- i. Bagaimana kemajuan dan kemunduran Daulah Abbasiyah?

BAB II PEMBAHASAN

A. Proses Berdirinya Dinasti Umayyah

Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama “Umayyah ibnu “Abdi Syams ibnu ‘Abdi Manaf” yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy dizaman Jahiliyah, dan ia selalu bersaing dan berusaha merebut kepemimpinan dan kehormatan Hasyim Abdi Manaf dikalangan masyarakat bangsanya. Pada keturunannya sangat menolak keras dengan ajaran nabi dan menolak dengan tegas kekhalifahan atau kepemimpinan nabi Muhammad SAW. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah nabi Muhammad SAW dapat menaklukkan kota Makkah. Sepeninggalan Rasulullah keturunan Umayyah, mereka sudah menginginkan kekhalifahan pengganti Rasulullah, tetapi mereka belum berani mengemukakan dirinya pada masa Khalifah Abu Bakar ash Shidiq dan Umar bin Afwan. Setelah wafatnya khalifah Umar bin Afwan, maka Bani Umayyah menyokong Utsman bin Afwan untuk dijadikan menjadi khalifah pengganti Umar, dengan hasil Musyawarah, sehingga berhasillah Utsman menjadi Khalifah pengganti Umar. Pada masa pemerintahan Utsman inilah Mu’awiyah mencurahkan seluruh kekuatannya untuk memperkuat dirinya dan menyiapkan kota Syam untuk dijadikan pusat kekuasaannya dikemudian harinya.

Ketika Ali bin Abi Thalib menjadi Khalifah menggantikan Utsman, Muawiyah sebagai gubenur di Syam, membentuk golongan orang-orang yang menolak tegas perintah Khalifah Ali, dia pun mendesaknya untuk mengusut kematian Ustman bin Afwan. Desakan Mu’awiyah ini pun tumpah saat perang Sifiin, yakni pertempuran antara pihak Mu’awiyah dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Pada perang ini pun terjadi genjatan senjata atau *tahkim* sehingga pihak Ali pun terbagi menjadi dua, yakni pihak syiah atau pengikut Ali, dengan pihak Khawarij atau penentang Ali, dan pihak Mu’awiyah itu sendiri. Pada tanggal 20 Ramadhan 40 H salah seorang Khawarij membunuh Ali, sehingga dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib ini berakhir pula masa pemerintahan Khulafa’ al-

Rasydin, dan menjadi jalan yang baik untuk Muawiyah melancarkan rencananya untuk dapat menjadi Khalifah. Pada tahun 661 M/41 H maka menjadi tahun persatuan (*Am al-Jama'ah*)¹ atau tahun dimana Muawiyah melakukan sumpah jabatan yang dilakukan di depan dua putra Ali, yakni Hasan dan Husein, dan rakyat banyak.

1. Khalifah-Khalifah Dinasti Umayyah

Dinasti Umayyah ini yang berlangsung selama ±91 tahun, yakni dari tahun 41-132 H, yang diperintah sebanyak 14 khalifah yang beribukota di Damaskus. Pada periode Bani Umawiyah ini dibagi menjadi tiga bagian periode, yakni permulaan, keemasan, dan keruntuhan. Pada masa permulaan, yakni ditengarai meletakkan dasar pemerintahan, pembunuhan Husein, perampasan kota Madinah, Penyerbuan Mekkah pada masa Yazid I, dan perselisihan diantara suku-suku Arab pada masa Muawiyah II.²

Pada masa permulaan atau pertumbuhan ini mencakup masa pemerintahan Mu'awiyah (661 – 680 M/ 40-60 H), Yazid bin Mu'awiyah (680-683 M/61-63 H), Mu'awiyah bin Yazid (683 M/63 H) dan Marwan bin Hakam (684 – 685 M/64-65 H).³

Pada masa puncak pemerintahan Daulah Umayyah berlangsung selama 30 tahun (685 -705 M), yaitu Abd al-Malik bin Marwan (685 – 705 M) dan putranya Walid bin Abd al-Malik (705 – 715 M)⁴. Pada masa keemasan periode ini adalah pada Khalifah Walid I yang mana negara Islam meluas ke daerah Barat dan Timur, beban masyarakat berkurang, berbagai macam pembangunan telah dilakukan, seperti masjid, gedung-gedung sekolah mendapatkan perhatian serius darinya. Kejayaan pun mulai suram saat dibawah kekhalifahan Umar II (Umar ibn Abd al-Aziz), ia merupakan pelopor penyebaran agama Islam, akan tetapi

¹ Choirul Rofiq, *Sejarah Peradaban Islam-Dari Masa Klasik Hingga Modern*, (Ponorogo:STAIN Ponorogo press, 2009), h. 117

² Choirul Rofiq, *Sejarah Peradaban Islam-Dari Masa Klasik Hingga Modern*, h. 117

³ Lihat Syamruddin Nasution, *Sejarah Peradaban Islam*, (Pekanbaru: Yayasan pusaka Riau, 2013), h. 107

pemerintahannya hanya 2 tahun 5 bulan saja⁵, setelah ia diganti oleh khalifah setelahnya, maka kepentingan pribadipun diutamakan daripada kepentingan umum, perselisihan antar putra mahkotapun tidak terelakan, begitu pula dengan kepemimpinan daerah dan pertempuran dengan pasukan Abbasiyah di Irak, sehingga kemenangan pun ada dipihak Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani, sehingga ibukota Umawiyah pun menjadi daerah kekuasaan Abbasiyah.

Pada masa kemunduran pemerintahan, masa ini mencakup delapan orang khalifah, yaitu Sulaiman bin Abd al-Malik (715–717 M), Umar bin Abd al-Aziz (717-720 M), Yazid bin Abd al-Malik (720-724 M), Hisyam bin Abd Malik (724-743 M), al-Walid bin Yazid (743-744 M), Yazid bin al-Walid (744 M), Ibrahim bin Sulaiman (744 M), dan Marwan bin Muhammad (744-750 M).

2. Sistem Pemerintahan Pada Masa Daulah Ummayah

Dalam sistem kekuasaan pada masa *Khulafa al-Rasyidun* yang bermula demokrasi, dengan pemindahan ditangan Muawiyah berpindah menjadi monarki hereditis (kerajaan turun-menurun). Sikap ini pun diawali saat Muawiyah bin abu sufyan mengangkat anaknya Yazid untuk dijadikan menjadi Khalifah berikutnya. Sikap ini pun dipengaruhi oleh keadaan Suriah, saat ia menjabat sebagai gubener disana, yang dipengaruhi sistem Monarki hereditis di Persia dan kekaisaran Byzantium. Pada masa Mu'awiyah I dimulai perubahan-perubahan administrasi pemerintahan, mulai dari pasukan pengawal raja, mendirikan balai-balai pendaftaran dan juga menaruh perhatian atas jawatan pos yang menjadi suatu susunan yang teratur yang menghubungkan bagian negara. Seperti dewan Sekretaris Negara (*Diwan al-Kitabah*) yang terdiri dari lima sekretaris, yakni; *katib ar rasail*, *katib al kharaj*, *katib al jund*, *katib al syurthah*, dan *katib al qadhi*'. Yang mana dari sekeretaris negara itu mengurus administrasi pemerintahan. Dan diangkat pula seorang amir untuk dijadikan pemimpin disetiap daerah. Pada Masa Abd al-Malik bin Marwan, yakni khalifah ke-5 , pelaksanaan

⁵ Choirul Rofiq, *Sejarah Peradaban Islam-Dari Masa Klasik Hingga Modern*, h. 118

pemerintahan dibagi menjadi beberapa pokok, yakni⁶; kementerian pajak tanah (*Diwan al-Kharaj*) yang tugasnya mengawasi tugas Departemen Keuangan, kementerian pengesahan (*Diwan al-Khatam*) yang bertugas (*Diwan al-Rasail*) untuk mengontrol permasalahan-permasalahan di setiap daerah, dan semua komunikasi dari para gubernur, kementerian urusan perpajakan (*Diwan al-Mustaghalat*).

Perluasan wilayah pada, kekuasaan Bani Umayyah untuk daerah Timur dan juga Barat mencapai kegemilangan pada masa Walid I pada masa ini pun ada pemimpin pasukan terkemuka sebagai penakluk yaitu Qutaybah ibn Muslim, Muhammad ibn Qasim, dan Musa ibn Nusayr. Di daerah Timur yang bisa ditaklukkan oleh Bani Umayyah yakni daerah Khurasan sampai ke Lahore di Pakistan, sedangkan di daerah Barat yakni ke arah Byzantium. Sedangkan pada masa Qutaybah bin Muslim, ia berhasil menaklukkan Balk, Bukhara, Khawarazm, Farghana, dan Samarkhand. Sedangkan Muhammad Ibn Qasim melumpuhkan seluruh penjuru Sind hingga Malatya (pusat haji terkenal orang India, di dekat Punjab). Untuk Musa ibn Nusayr yang meluaskan daerah kekuasaannya di daerah Barat yakni Aljazair dan Maroko. Musa pun mengangkat Thariq bin Ziyad sebagai wakil untuk memerintah bagian itu. Dengan didorong kemenangan di Afrika Utara dan karena adanya kerusuhan merebut kekuasaan dalam kerajaan Gothia di Spanyol. Setelah mendengarkan kemenangan Thariq dalam menaklukkan Spanyol, pasukan Musa melebarkan kembali wilayah kekuasaan sampai ke Barcelona, Narbonne, Cadiz, dan Calice, lalu ke selatan Prancis.

Prinsip keuangan yang dilakukan pada masa ini adalah mengikuti pada masa Khulaur Rasydun, yaitu dengan penetapan pajak tanah, dan pajak perorangan untuk setiap individu penghuni setiap daerah-daerah yang telah dikalahkan merupakan pemasukan sendiri bagi pemerintahan Bani Umayyah. Hal ini pun untuk dapat kelancaran penggalangan dana tentara dan juga untuk menyebarkan syiar Islam.

Perkembangan Peradaban Pada Masa Dinasti Umayyah

a. Arsitektur

⁶ Choirul Rofiq, *Sejarah Peradaban Islam-Dari Masa Klasik Hingga Modern*, h. 118

Beberapa hal yang menonjol dari arsitektur Bani Umayyah yakni pembangunan kota-kota baru dan kota-kota lama dengan gaya perpaduan persia, Romawi, dan Arab, dan juga pada pembangunan masjid-masjid, seperti di Masjid Damaskus atas kreasi arsitektur Abu Ubaidillah ibn Jarrah, dengan gaya kubah-kubahnya yang berukuran besar berbentuk tapak besi kuda bulat, dan disekiling masjid terdapat empat mercusuar yang merupakan bangunan peninggalan Yahudi, tetapi empat mercusuar hanya digunakan satu mercusuar yang terletak ditenggara masjid untuk Adzan.

b. Organisasi Militer

Pada masa kekuasaan bani Umayyah ini untuk keorganisasian militer ini dibagi menjadi tiga bagian, yakni; angkatan darat (*al-jund*), angkatan laut (*al-bahriyah*), dan angkatan kepolisian (*al-syurtah*). Pada masa Umayyah bala tentara ini sesuai dengan sistem Arabisme, yang terdiri dari suku bangsa Arab saja, akan tetapi ketika sampai pada ekspansi di Afrika Utara, suku Berber turut ambil bagian pada masa ini. Pada masa Abd al-Malik bin Marwan diberlakukan wajib militer untuk setiap rakyatnya. Yang setiap aktivitasnya ini pun dilengkapi dengan baju besi, kuda, pedang, panah, dan lain sebagainya. Untuk angkatan laut ini yakni dengan pembuatan kapal-kapal guna untuk mengankis serangan armada Byzantium serta sebagai sarana transportasi dalam usaha untuk perluasan wilayah. Sedangkan untuk armada kepolisian ini awalnya merupakan bagian dari organisasi kehakiman, lalu bersifat independen yang bersifat indenpenden yang mengurus kejahatan-kejahatan.

c. Perdagangan

Untuk perdagangan pada masa Bani Umayyah ini ada beberapa jalur untuk mencapai kemajuan perekonomian, yakni melawati jalur darat dengan menggunakan *Jalus Sutra* ke Tiongkok untuk perdagangan jenis Sutra, keramik, obat-obatan, dan wewangian. Sedangkan yang lainnya yakni dengan jalur laut, untuk perdagangan rempah-rempah, bumbu, kasturi, permata, logam mulia, yang ini pun dominan ke arah negeri bagian Timur.

d. Reformasi Fiskal

Dalam hal ini pemerintahan Umayyah dalam pengumpulan pembendaharaan negara, yakni salah satunya dengan mengumpulkan biaya pajak dari masyarakat, baik itu pajak untuk penduduk Arab Muslim, ataupun non-Muslim. Dalam hal ini pemerintah dalam menerapkan pembagian wajib pajak yang terberat kepada penduduk yang non Muslim, yang wajib membayar pajak Tanah dan juga pajak kepala, sedangkan untuk penduduk Muslim hanya diwajibkan membayar pajak tanah saja. Dengan sistem pembagian pajak seperti ini sehingga menimbulkan ketidak puasan dalam lingkungan orang non-muslim sehingga pada akhirnya menimbulkan gerakn untuk nmenumbangkan kekuasaan Umayyah.

5. Runtuhnya Dinasti Umayyah

Sepeninggal Hisyam Ibn Abd. Malik, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil bukan hanya lemah tetapi juga bermoral buruk. Hal ini makin memperkuat golongan oposisi. Akhirnya pada tahun 750 M Daulah Umayyah digulingkan Bani Abbas yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani.⁷ Marwan Bin Muhammad khalifah terakhir bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir, ditangkap dan dibunuh disana.⁸

Dari berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak mampu menahan kehancurannya, akibat kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari fihak luar. Adapun hal-hal yang membawa kemunduran yang akhirnya berujung pada kejatuhan Bani Umayyah dapat diidentifikasi antar lain sebagai berikut:

- a. Pertentangan keras antara suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Utara yang disebut *Mudariyah* yang menempati Irak dan Arab Selatan *Himyariyah* yang berdiam di wilayah Suriah. Di zaman Umayyah persaingan antar etnis itu mencapai puncaknya, karena para khalifah cenderung kepada satu fihak dan menafikan yang lainnya;

⁷ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, (Cet. XII, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta: 2001), h. 47

⁸ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, h. 47

- b. Ketidak puasan sejumlah pemeluk Islam non Arab. Mereka yang merupakan pendatang baru dari kalangan bangsa-bangsa yang dikalahkan mendapat sebutan "*Mawali*", suatu status yang menggambarkan inferioritas di tengah-tengah keangkuhan orang-orang Arab yang mendapat fasilitas dari penguasa Umayyah. Mereka bersama-sama Arab mengalami beratnya peperangan dan bahkan atas rata-rata orang Arab, tetapi harapan mereka untuk mendapatkan tunjangan dan hak-hak bernegara tidak dikabulkan. Seperti tunjangan tahunan yang diberikan kepada Mawali ini jumlahnya jauh lebih kecil dibanding tunjangan yang dibayarkan kepada orang Arab;
- c. Latar belakang terbentuknya kedaulatan Bani Umayyah tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik politik. Kaum syi'ah dan khawarij terus berkembang menjadi gerakan oposisi yang kuat dan sewaktu-waktu dapat mengancam keutuhan kekuasaan Umayyah. Disamping menguatnya kaum Abbasiyah pada masa akhir-akhir kekuasaan Bani Umayyah yang semula tidak berambisi untuk merebut kekuasaan, bahkan dapat menggeser kedudukan Bani Umayyah dalam memimpin umat.⁹

Secara garis besar menurut Badri Yatim, faktor yang menyebabkan Daulah Bani Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran antara lain adalah :

- a. Sistim pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan sesuatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekankan aspek senioritas. Pengaturannya tidak jelas. Ketidakjelasan sistem pergantian khalifah ini menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dikalangan anggota keluarga istana;
- b. Latar belakang terbentuknya Daulah Bani Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Sisa-sisa kaum Syi'ah (pengikut Ali) dan Khawarij terus menjadi gerakan oposisi, baik secara terbuka seperti dimasa awal dan akhir maupun secara tersembunyi seperti dimasa pertengahan kekuasaan Bani Umayyah. Penumpasan terhadap gerakan-gerakan ini banyak menyedot kekuatan pemerintah;

⁹ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Cet. II, Logos Wacana Ilmu; Jakarta: 1999 M) h. 83-84

- c. Pada masa kekuasaan bani Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arabia Utara (Bani Qays) dan Arabia Selatan (Bani Kalb) yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam, makin meruncing. Perselisihan ini mengakibatkan para penguasa Bani Umayyah mendapat kesulitan untuk menggalang persatuan dan kesatuan. Disamping itu, sebagian besar golongan Mawali (non Arab), terutama di Irak dan wilayah bagian timur lainnya, merasa tidak puas karena status Mawali itu menggambarkan suatu inferioritas, ditambah dengan keangkuhan bangsa Arab yang diperlihatkan pada masa Bani Umayyah;
- d. Lemahnya pemerintahan Daulat Bani Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah dilingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tatkala mereka mewarisi kekuasaan, disamping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang;
- e. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan Daulah Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh keturunan al-Abbas Ibn Abd. Al-Muthalib. Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Bani Hasyim dan golongan Syi'ah dan kaum Mawali yang merasa dikelas duakan oleh pemerintahan Bani Umayyah.¹⁰

6. Proses Terbentuknya Dinasti Abbasiyah

Sejarah Peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada daulah Abasiyah bermula ketika adanya pihak oposan yakni Bani Hasyim yang menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka adalah keluarga Nabi saw yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi baru menjelma menjadi gerakan ketika Bani Umayyah naik takhta dengan mengalahkan Ali bin Abi Talib dan bersikap keras terhadap Bani Hasyim. Alasan lainnya kenapa mereka bersikap oposan adalah karena menurut mereka pemerintahan Umayyah telah banyak menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam.

Propaganda Abbasiyah di mulai ketika Umar bin Abd al-Aziz (717-720) menjadi khalifah Daulah Umayyah. Umar memimpin dengan adil. Ketentraman

¹⁰ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, h. 49

dan stabilitas negara memberi kesempatan kepada gerakan Abbasiyah untuk menyusun dan merencanakan gerakannya yang berpusat di al-Humayyah. Pimpinannya waktu itu adalah Ali bin Abdullah bin Abbas, seorang zahid. Dia kemudian digantikan oleh anaknya, Muhammad, yang memperluas gerakannya. Dia menetapkan tiga kota sebagai pusat gerakan yaitu kota al-Humayyah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, kota Kufah sebagai kota penghubung dan kota Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Muhammad wafat pada tahun 125 H/743 M dan digantikan oleh anaknya Ibrahim al-Imam. Panglima perangnya berasal dari Khurasan bernama Abu Muslim al-Khurasani. Abu Muslim berhasil merebut Khurasan dan kemudian menyusul kemenangan demi kemenangan. Pada awal tahun 132 H/749 M Ibrahim al-Imam tertangkap oleh pemerintah Daulah Umayyah dan dipenjara sampai ia meninggal. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal pada akhirnya ia digantikan oleh saudaranya Abu Abbas. Tidak lama setelah itu, dua bala tentara Abbasiyah dan Umayyah bertempur di dekat sungai Zab bagian hulu. Dalam pertempuran itu Bani Abbas mendapatkan kemenangan dan bala tentaranya terus menuju ke negeri Syam (Suriah) dan disinilah pada akhirnya kota demi kota dikuasainya.¹¹

Pada masa pemerintahan Abu al-Abbas sangatlah singkat yaitu dari tahun 150-754 M. kemudian digantikan oleh Abu Ja'far al-Mansur yang merupakan saudara dari Abu al-Abbas. Abu Ja'farlah sebenarnya yang dikenal sebagai pembina sekaligus bapak dari keturunan para khalifah Dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far dikenal sebagai seorang yang keras dalam menghadapi lawan-lawannya terutama dari keturunan bani umayyah, Khawarij, Syi'ah yang merasa terdiskriminasi oleh Dinasti Abbas.

7. Tokoh Pada Masa Dinasti Abbasiyah

Pada zaman Abbasiyah konsep kekhalifahan (pemerintahan) berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai

¹¹ Untuk lebih rincinya lihat sejarah munculnya Dinasti Abbasiyah dalam “*Ensiklopedi Islam*” atau tulisannya Nur Ahmad Fadhl Lubis, dalam “*Ensiklopedi Tematik Dunia Islam*”. Bandung: Mizan, 2004, hlm. 81

dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain¹²:

- a. Para Khalifah tetap dari Arab, sementara para menteri gubernur, panglima perang dan pegawai lainnya banyak dipilih dari keturunan Persia dan Mawali;
- b. Kota Baghdad ditetapkan sebagai ibukota negara dan menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan;
- c. Kebebasan berfikir dan berpendapat mendapat porsi yang tinggi;
- d. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting dan mulia;
- e. Para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintah.

Dalam dinasti Bani Abbasiyah ini terdapat 37 khalifah berkuasa kurang lebih selama lima abad (750-1258 M). Ada beberapa tokoh yang sangat berjasa dan sukses dalam penggulingan Dinasti Umayyah, yakni;

- a. Muhammad bin Ali bin Abd Allah bin al-Abbas

Beliau adalah putra dari Ali bin Abd Allah, yang merupakan seorang yang zuhud, meningkatkan kualitas ibadah, dan juga baik dalam menjalin persahabatan dengan bani Umayyah, sehingga ia pun diberi daerah kekuasaan oleh khalifah Walid ibn Malik, yakni daerah Hummayyah yang terletak didekat Damaskus, tetapi anaknya yakni khalifah Muhammad bin Ali termasuk seseorang yang cerdas dan Ambisius terhadap kekuasaan, ia pun dapat dikatakan sebagai perintis pergerakan.

- b. Ibrahim al-Imam

Ia adalah putra dari Muhammad bin Ali, dan Ia adalah penerus kepemimpinan setelah sepeninggalan ayahnya. Semasa kepemimpinannya mengalami kemajuan yang sangat pesat, akan tetapi dengan kekuasaannya ia pun bermain dengan leluasa dengan kekuasaan yang dimilikinya. Setelah Abu Muslim memberikan seperlima dari hartanya, lalu diangkatnya Abu Muslim menjadi pemimpin di Khurasan, dan memberikan kekuasaan kepada Abu Muslim untuk melakukan propaganda secara besar-besara, yaitu membunuh siapa saja yang dicurigainya.

12

c. Abu al-Abbas al-Saffah

Setelah saudaranya Ibrahim al-Imam meninggal dunia, maka Abu al-Abbas al-Saffah menggantikan posisinya menjadi pemimpin, sampai benar-benar Dinasti Umayyah dapat digulingkan. Ia pun langsung mengangkat dirinya menjadi khalifah pertama di Dinasti Abbasiyah, dengan menggelari dirinya al-Saffah yang berarti sang penumpah darah.

d. Abu Muslim al-Khurasani

Biasa ia menyebut dirinya sebagai gubener keluarga Muhammad (Amir al-Muhammad), kedudukan ini ia pangku sampai kekhalifahan as Shaffah, lalu pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Manshur, kebesaran Abu Muslim di balas dengan kejahatan, karena dikhawatirkan membawa pengaruh kepada masyarakat.

e. Abu Salamah al-Khalal

Beliau adalah salah satu tokoh yang dapat mempengaruhi Ibrahim al-Imam, yang mana pada tahun 744 H Bukhayr ibn Mahan wafat, pada waktu ia mendapatkan persetujuan dari Ibrahim al-Imam untuk pengangkatan menantunya, maka ia pun memakai gelar Wazir al-Muhammad atau menteri keluarga Muhammad, ia merupakan seorang yang kaya raya, dan ahli dalam perpolitikan, namun pada saat kesuksesan hampir tergapai, maka Khalifah al-Saffah membunuhnya, atas persetujuan oleh Abu Muslim.

8. Gerakan Perjalanan Dinasti Abbasiyah

Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dapat dibagi dalam dua periode. Periode I adalah masa antara tahun 750-945 M, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai al-Mustakfi. Periode II adalah masa 945-1258 M, yaitu masa al-Mu'ti sampai al-Mu'tasim. Pembagian periodisasi diasumsikan bahwa pada periode pertama, perkembangan diberbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil dan dinamis. Sedangkan pada periode II, kejayaan terus merosot sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil mengancurkan Dinasti Abbasiyah.

Pada Pemerintahan Abbasiyah periode I, telah mengembangkan kebijakan-kebijakan politik diantaranya adalah:

a. Memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad;

- b. Memusnahkan keturunan Bani Umayyah;
- c. Merangkul orang-orang persia, dalam rangka politik memperkuat diri, Abbasiyah memberi peluang dan kesempatan yang besar kepada kaum Mawali;
- d. Menumpas pemberontakan-pemberontakan;
- e. Menghapus politik kasta.

Dalam menjalankan pemerintahan, Khalifah Dinasti Bani Abbasiyah pada waktu itu dibantu oleh *wazir* (perdana menteri) yang jabatannya disebut *wizaraat*. *Wizaraat* ini dibagi menjadi 2 yaitu: pertama, *wizaraat tafwid* (memiliki otoritas penuh dan tak terbatas), *waziraat* ini memiliki kedaulatan penuh kecuali menunjuk penggantinya. Kedua, *wizaraat tanfidz* (memiliki kekuasaan eksekutif saja) *wizaraat* ini tidak memiliki inisiatif selain melaksanakan perintah khalifah dan mengikuti arahnya.

Sedangkan untuk model pemerintahan yang diterapkan oleh Abbasiyah bisa dikatakan asimilasi dari berbagai unsur. Ini terlihat jelas dari adanya perodesasi atau tahapan pemerintahan Abbasiyah. Ciri-ciri yang menonjol pada masa pemerintahan Abbasiyah yang tidak terdapat di zaman Umayyah adalah¹³:

- a. Dengan berpindahnya ibu kota ke Baghdad, pemerintah Bani Abbas menjadi jauh dari pengaruh arab, sedangkan dinasti Bani Umayyah sangat berorientasi kepada Arab. Dalam periode pertama dan ketiga pemerintahan Abbasiyah, pengaruh kebudayaan Persia sangat kuat, dan pada periode kedua dan keempat bangsa turki sangat dominan dalam politik dan pemerintahan dinasti ini;
- b. Dalam penyelenggaraan negara, pada Bani Abbasiyah jabatan *wazir*, yang membawahi kepala-kepala departemen. Jabatan ini tidak ada di dalam pemerintahan Bani Umayyah;
- c. Ketentaraan profesional baru terbentuk pada masa pemerintahan Bani Abbas, sebelumnya belum ada tentara yang profesional.

9. Kemajuan dan Kemunduran Daulah Abbasiyah

Keinginan dan kemauan merupakan salah satu unsur kekuatan kejiwaan manusia. Keinginan merupakan bagian integral dari tri potensi kejiwaan: cipta/akal (*ratinale*), rasa (*emoticon*), dan karsa, kemauan, dan keinginan (*will*). Ketiganya dalam satu kesatuan yang utuh dan bekerja saling melengkapi. Potensi karsa inilah yang menjadi dorongan rasa ingin tahu itu muncul dan berkembang.¹⁴

Kekuasaan pada periode Bani Abbas ini menerapkan pola pemerintahan berbeda-beda sesuai dengan kondisi politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan dan politik terbagi menjadi lima periode, yakni:

- a. Periode Awal atau Pengaruh Persia Pertama (750-847), Ada 10 khalifah yang memimpin pada masa ini, telah dikatakan pada awal pembahasan bahwa salah satu ciri pemerintahan Abbasiyah adalah adanya unsur non Arab yang mempengaruhi pemerintahannya seperti Persia dan Turki. Pada awal pemerintahannya Abbasiyah lebih cenderung seperti pemerintahan Persia dimana raja mempunyai kekuasaan absolut yang mendapat mandat dari tuhan. Masa inilah yang mengantarkan Abbasiyah pada puncak kejayaannya;
- b. Periode Lanjutan atau Turki Pertama (847-945), Ada 13 khalifah yang memerintah pada masa ini, masa ini ditandai dengan kebangkitan orang Turki salah satu cirinya adalah orang Turki memegang jabatan penting dalam pemerintahan, terbukti dengan dibangunnya kota *Samarra* oleh al-Mu'tashim. Sepeninggal al-Mutawakkil, para jenderal Turki berhasil mengontrol pemerintahan, sehingga khalifah hanya dijadikan sebagai "boneka" atau simbol seperti khalifah al-Muntashir, al-Mustain, al-Mu'tazz, al-Muhtadi;
- c. Periode Buwaihiyah atau pengaruh persia kedua (945-1055), Ada 5 khalifah yang memerintah pada masa ini, masa ini berjalan lebih dari 150 tahun, namun secara de facto kekuasaan khalifah dilucuti dan bermunculan dinasti-dinasti baru. Kemunculan dinasti Buwaihiyyah ini, pada awalnya untuk menyelamatkan khalifah yang telah jatuh sepenuhnya dibawah kekuasaan para pengawal yang berasal dari Turki. Dominasi bani Buwaihiyyah berasal dari

¹⁴ Suparlan Suhartono, "Dasar-Dasar Filsafat" dalam Abdullah H. Abd Talib, *Filsafat Ilmu*, h. 99

diangkatnya Ahmad bin Buwaih oleh al-Muktafié sebagai jasa mereka dalam menyingkirkan pengawal-pengawal Turki. Pengangkatan ini merupakan senjata makan tuan, dimana Ahmad bin Buwaih yang diangkat sebagai amir umara' dengan gelar *Muiz ad daulah* menurunkan khalifah Muktafié. Masa bani Buwaihiyyah ini, Abbasiyah menghadapi 2 polemik besar, yaitu:

- 1) Adanya pemerintahan tandingan, yaitu berdirinya Fatimah (967-1171), dinasti Samaniah di Khurasan (847-1055), dinasti hamidiah di Suriah (924-1003), dinasti Umayyah di Spanyol (756-1030), dinasti Ghaznawiyah di Afganistan (962-1187);
 - 2) Adanya perang ideologi antara syi'ah dan sunni. Sebenarnya, Buwaihiyyah merupakan dinasti yang beraliran syi'ah, sehingga sejak awal pemerintahannya mereka memaksakan upacara-upacara syi'ah seperti upacara kematian Husain cucu Rasulullah harus diperingati, jika tidak mau maka akan dihukum atau disiksa. Namun pemaksaan tersebut tidak berjalan lama karena harus berhadapan dengan masyarakat Sunni ditambah dengan adanya manifesto Baghdad yang secara langsung menghentikan propaganda Buwaihiyyah atas Syi'ah di Baghdad.
- d. Periode Dinasti Saljukiyah Atau Pengaruh Turki Kedua (1054-1157 M). Masa ini berawal ketika Seljuk mengontrol kekuasaan Abbasiyah dengan mengalahkan Bani Buwaihiyyah dan berakhir dengan adanya serbuan Mongol. Kekuasaan Saljuk berawal ketika penduduk Baghdad marah atas tindakan jenderal Arselan Basasieri yang memaksa rakyat Baghdad untuk menganut syi'ah dengan cara menahan khalifah al-Qaim dan menghapuskan nama-nama khalifah Abbasiyah diganti dengan nama khalifah Fatimiah. Kondisi ini tidak berlangsung lama dengan dikalahkannya Arselan Basasieri oleh Tughrul Bey yang pernah menjadi tentara bayaran Abbasiyah. Tughrul bey berhasil mendudukkan khalifah al-Qaim pada jabatannya sebagai penguasa yang sah dan resmi dengan gelar kehormatan Sulthan wa Malik As Syirqi wa Maghrib dan juga mengawinkannya dengan putri khalifah al-Qaim, adapun khalifah yang memerintah masa pengaruh Turki kedua ada 11. Khalifah-khalifah itu

hanya mempunyai wewenang dalam bidang keagamaan saja, sedangkan bidang lainnya dibawah dominasi Turki.

- e. Bebas Dari Pengaruh Lain (1157-1258). Masa sesudah kekhalifahan Abbasiyah sebenarnya bebas dari pengaruh manapun namun secara perlahan namun pasti menuju kehancuran dimana setelah berakhirnya Mas'ud bin Muhammad yang menghabisi kekuasaan Seljuk maka kekhalifahan Abbasiyah dikacau lagi dengan adanya kaum khwarzamsyah dari Turki yang dulunya menjaddi pembantu Seljuk yang kemudian menamakan diri dengan Atabeg (bapak raja/amir). Berkuasanya kaum Khwarzamsyah dibawah kepemimpinan sultan Alaudin Takash memaksa khalifah Nashir (khalifah ke-31) untuk mencari dukugan dari luar, dari bangsa Tartar Mongol untuk menghancurkan lawan politiknya, dan inilah yang menjadi kesalahan terbesar Abbasiyah, karena selain menghancurkan Khurzamsyah bangsa Tartar juga memusnahkan Baghdad dan kota Islam lainnya sehingga sampai masa hulagu khan cucu Jengis Khan Abbasiyah sudah habis riwayatnya.

Pada masa Bani Abbasiyah dalam sistem pemerintahan mulai diadakan pembaharuan-pembaharuan dalam ketentaraan diantaranya adalah dengan:

- a. Membuka keanggotaan tentera bukan hanya untuk orang Arab saja akan tetapi juga kepada orang non Arab;
- b. Mengemas sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketentaraan;
- c. Memberikan Gaji dan hadiah kepada tentera, misalnya: Khalifah hadiahkan sebidang tanah untuk menghargai jasa tentera. Cara ini dikenali sebagai "Al-Iqtha'

Dengan melakukan beberapa pembaharuan-pembaharuan tersebut akhirnya tentara Islam pada masa Bani Abbasiyah pun mengalami kejayaan.

Begitu juga bagian-bagian didalam pemerintahan membentuk biro-biro pemerintahan:

- 1) *Diwan al-Kitaabah* (Sekretaris Negara) yang tugasnya menjalankan tata usaha Negara;

- 2) *Nidham al-Idary al-Markazy* yaitu sentralisasi wilayah dengan cara wilayah jajahan dibagi dalam beberapa propinsi yang dinamakan *Imaarat*, dengan gubernurnya yang bergelar *Amir* atau *Hakim*. Kepala daerah hanya diberikan hak otonomi terbatas; yang mendapat otonomi penuh adalah “*al-Qura*” atau desa dengan kepala desa yang bergelar *Syaikh al-Qariyah*;
- 3) *Amir al-Umara* yaitu panglima besar angkatan perang Islam untuk menggantikan posisi khalifah dalam keadaan darurat;
- 4) *Bait al-Maal*, dengan tiga dewan; *Diwan al-Khazaanah* untuk mengurus keuangan Negara, *Diwan al-Azra'u* untuk mengurus kekayaan Negara dan *Diwan Khazaainus Sila*, untuk mengurus perlengkapan angkatan perang;
- 5) Organisasi kehakiman, *Qiwān Qadl al-Qudha* (Mahkamah Agung), dan *al-Sutrah al-Qadlāyah* (jabatan Kejaksaan), *Qudhah al-Aqaalim* (hakim propinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi), serta *Qudlah al-Amsaar* (hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri);
- 6) *Diwan al-Tawqi*, dewan korespondensi atau kantor arsip yang menangani semua surat-surat resmi, dokumen politik serta instruksi ketetapan khalifah, dewan penyelidik keluhan departemen kepolisian dan pos;
- 7) *Diwan al-Nazhar fi al-Mazhalim*, dewan penyelidik keluhan adalah jenis pengadilan tingkat banding, atau pengadilan tinggi untuk menangani kasus-kasus yang diputuskan secara keliru pada departemen administratif politik;
- 8) *Diwan al-Syurthah*, departemen kepolisian yang dikepalai oleh seorang pejabat tinggi yang diangkat sebagai *Shahih al-Syurthah* yang berperan sebagai kepala polisi dan kepala keamanan istana;
- 9) *Diwan al-Barid*, departemen pos, yang dikepalai oleh seorang pejabat yang disebut *Shahih al-Barid*, tugas departemen pos tidak terbatas pada memberikan layanan terbatas untuk surat-surat pribadi akan tetapi juga dimanfaatkan untuk mengantar para gubernur yang baru dipilih ke provinsi mereka masing-masing, juga untuk mengangkut tentara dan barang bawaannya.

Popularitas Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya al-Ma'mun. Kekayaan banyak digunakannya dalam bentuk sosial, yakni dengan berbagai macam pembangunan tempat dan sarana Umum. Pada masanya pula terdapat 800 tabib , dan pada masa inilah kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesusteraan berada pada keemasannya. Dan pada masa inilah negara Islam, menjadi negara kuat yang tak tertandingi. Begitu pula dengan putranya, yakni al makmun, ia sangat cinta sekali dengan berbagai macam ilmu pngetahuan, sehingga pada masa kekhalifahannya bernagai macam buku ia terjemahkan, dan tak segan-segan menggaji berbagai penerjemah bahasa,pada masanya inilah yang menjadikan kota Bagdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang di munculkan pada masa golden age ini, yang mana pendidikan pada masa daulah Muawiyah hanya berada atau berpusat di masjid-masjid, maka pada periode ini madrasah-madrasah dari semua tingkatan dimunculkan, dengan pelopor Nizam al-Mulk, begitu juga dengan ilmu tafsir, ilmu Hadis, dan banyak lagi ilmu-ilmu, baik itu ilmu eksak dan yang lainnya.

Transformasi ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani ke dalam dunia Islam, merupakan suatu kisah yang unik dan memukau. Pemikir Islam yang telah berjasa dalam mewarnai corak kejayaan ilmu pengetahuan dan filsafat di zaman klasik di antaranya: pemuka-pemuka Mu'tazilah, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Ibnu Maskawaih, Ibnu Hasyira, Ibnu Hayyan, Al-Khawarismi, Al-Mas'udi dan Al-Razi.¹⁵

Diinformasikan pula bahwa para pemikir Islam tersebut di bawah lindungan khalifah. khususnya pada zaman Abbasyiah. Ketika al-Makmun mendirikan Bait Al-Hikmah yang termahsyur di Bagdad, merupakan kecintaan khalifah terhadap

¹⁵ Lihat Harun Nasution, "Pembaharuan Dalam Islam" dalam Muhammad Saleh Tajuddin dkk, *Dunia Islam dalam Lintasan Sejarah dan Realitasnya di Era Kontemporer*, Syi'ah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia, Jurnal Al-Fikr Vol. 20 No. 2 (Tahun 2016), h. 348

ilmu pengetahuan dan filsafat.¹⁶ Muhammad Iqbal menyebutkan bahwa karena dilindungi oleh khalifah-khalifah awal Abbasiy, ilmu pengetahuan dan filsafat terus berkembang di pusat-pusat intelektual dunia Islam sampai padaparah pertama abad ke-9.¹⁷

Sedangkan pada periode kedua masa pemerintahan Abbasiyah justru malah menurun, wilayah-wilayah Islam satu persatu mulai terpecah dan tercerai berai, di Andalusia, muncul Dinasti Umayyah kembali muncul yang mengangkat Abd al-Rahman al-Nashir menjadi khalifah. Begitu juga di Afrika Utara, kelompok syiah al-Islamiyah membentuk Dinasti Fathimiyah. Akibatnya pada periode abad ke 10 M ini sistem kekhalifahan akhirnya menjadi terpecah menjadi tiga bagian, yakni Bagdad, Afrika Utara, dan Spanyol. Di Mesir, Muhammad ikhsyid berkuasa atas nama Bani Abbas. Di Halb dan Mousil, Bani Hamdan muncul, begitu pula di Yaman, syiah Zaydiyah semakin kuat dengan kelompoknya. Di Baghdad, bani Buhawiyah berkuasa secara *de Facto* dan menjalankan pemerintahan Bani Abbas, sehingga khalifah hanya tinggal nama saja. Faktor-faktor yang menjadi sebab kemunduran Dinasti Abbasiyah adalah:

- 1) Pertentangan internal keluarga. Seperti halnya al-Manshur melawan Abd Allah ibn Ali pamannya sendiri. Konflik ini yang mengakibatkan keretakan psikologis yang mendalam dan menghilangkan solidaritas keluarga, sehingga mengakibatkan campur tangan kekuatan dari luar;
- 2) Kehilangan kendali dan munculnya dinasti-dinasti kecil. Dengan buaian gemilang harta dan kekuasaan yang mana setiap orang akan lupa atas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dengan semua kekuatan dan berbagai macam cara akan dilakukan untuk mencapai kekuasaan. Dan juga

¹⁶ Lihat C.A. Qadir, "Filsafat dan Ilmu Pengetahuan Dalam Islam", dalam Muhammad Saleh Tajuddin dkk, *Dunia Islam dalam Lintasan Sejarah dan Realitasnya di Era Kontemporer, Syi'ah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Al-Fikr Vol. 20 No. 2 (Tahun 2016), h. 348 (<http://scholar.google.co.id/citations?user=6EZe1YAAAAJ&hl=en>)

¹⁷ Lihat Muhammad Iqbal, "Metafisika Persia; Suatu: Sumbangan Untuk Sejarah Filsafat Islam" dalam Muhammad Saleh Tajuddin dkk, *Dunia Islam dalam Lintasan Sejarah dan Realitasnya di Era Kontemporer, Syi'ah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya di Indonesia*, Jurnal Al-Fikr Vol. 20 No. 2 (Tahun 2016), h. 348 (<http://scholar.google.co.id/citations?user=6EZe1YAAAAJ&hl=en>)

pada perdadana mentri seenaknya menggunakan kebijakan dari khalifah, merekapun berturut-turut melakukan kekuatan dari luar. Dengan kekuatan dari luar inii pun yang mengakibatkan kehancuran struktur kekuasaan dari dalam kekhalifahn itu sendiri. Dengan lemahnya sistem pemerintahan pusat, sehingga telah menggoda penguasa daerah utnuk melirik otonomisasi, seperti gubenur (*amir*) yang berdomisili di wilayah barat kota Bagdad seperti Idrisyah, Fathimiyah, Umayyah II, maupun yang berdomisili di Timur Bagdad, Tahiriyah, Samaniyah, untuk tidak lagi taat kepada Khalifah pusat. Pada kekacauan ini Holagu Khan keturunan dari Jengis Khan datang disertai dengan pasukan Tartar menghancurkan Bagdad dan meruntuhkan Bani Abbasiyah.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama “Umayyah ibnu “Abdi Syams ibnu ‘Abdi Manaf” yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy dizaman Jahiliyah, dan ia selalu bersaing dan berusaha merebut kepemimpinan dan kehormatan Hasyim Abdi Manaf dikalangan masyarakat bangsanya. . Pada tanggal 20 Ramadhan 40 H salah seorang Khawarij membunuh Ali, sehingga dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib ini berakhir pula masa pemerintahan Khulafa’ al-Rasydin, dan menjadi jalan yang baik untuk Muawiyah melancarkan rencananya untuk dapat menjadi Khalifah. Pada tahun 661 M/41 H maka menjadi tahun persatuan (*Am al-Jama’ah*) atau tahun dimana Muawiyah melakukan sumpah jabatan yang dilakukan di depan dua putra Ali, yakni Hasan dan Husein, dan rakyat banyak;
- b. Dinasti Umayyah ini yang berlangsung selama ± 91 tahun, yakni dari tahun 41-132 H, yang diperintah sebanyak 14 khalifah yang beribukota di Damaskus;
- c. Dalam sistem kekuasaan pada masa *Khulafa al-Rasyidun* yang bermula demokrasi, dengan pemindahan ditangan Muawiyah berpindah menjadi monarki hereditis (kerajaan turun-menurun);
- d. Perkembangan Peradaban Pada Masa Dinasti Umayyah terdapat pada arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan reformasi Fiskal;
- e. Pada tokoh pergerakan Abbasiyah yakni Ibrahim al-Imam mengangkat Abu Muslim sebagai pemimpin di Khurasan, dan diberikan kekuasaan untuk melakukan propaganda secara terang-terangan, dan ia pun di beri kekuasaan untuk melakukan pembunuhan kepada Masyarakat yang berbahasa Arab dan juga yang dicurigai dapat menggagalkan misinya. Selama bertahun-tahun gerakan tersebut tanpa hambatan dari Dinasti Umayyah. Ketika surat perintah pembunuhan yang dikirimkan oleh

Ibrahim al-Imam kepada Abu Muslim jatuh kepada Marwan ibn Muhammad, bencana pun menimpa Ibrahim al Imam di tangkap dan dipenjarakan di Haran setelah mengangkat al-Saffah sebagai penggantinya. Ibrahim pun dibunuh 132 H, meskipun telah dibunuh, akan tetapi langkah dari Marwan ibn Muhammad terlambat, karena sudah dikuasai oleh pemberontak. Bahkan benteng-benteng Damaskus telah terpasang bendera hitam Abbasiyah telah dikibarkan. Begitu juga di Hijaz, Syam, dan Irak. Pemberontak Syi'ah pun juga melanjutkan penyerbuan dari Khurasan hingga Irak, Syam, dan Mesir. Ia pun tewas terbunuh di mesir. Dengan wafatnya Marwan ibn Muhammad, maka berakhirilah kepemimpinan Dinasti Umayyiah.

- f. Sejarah Peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada daulah Abasiyah bermula ketika adanya pihak oposan yakni Bani Hasyim yang menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka karena mereka adalah keluarga Nabi saw yang terdekat. Tuntutan itu sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi baru menjelma menjadi gerakan ketika Bani Umayyah naik takhta dengan mengalahkan Ali bin Abi Talib dan bersikap keras terhadap Bani Hasyim. Alasan lainnya kenapa mereka bersikap oposan adalah karena menurut mereka pemerintahan Umayyah telah banyak menyimpang jauh dari nilai-nilai Islam. Propaganda Abbasiyah di mulai ketika Umar bin Abd al-Aziz (717-720) menjadi khalifah Daulah Umayyah.
- g. Pada zaman Abbasiyah konsep kekhalifahan (pemerintahan) berkembang sebagai sistem politik. Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya.
- h. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah dapat dibagi dalam dua periode. Periode I adalah masa antara tahun 750-945 M, yaitu mulai pemerintahan Abu Abbas sampai al-Mustakfi. Periode II adalah masa 945-1258 M, yaitu masa al-Mu'ti sampai al-Mu'tasim. Pembagian periodisasi diasumsikan bahwa pada periode pertama, perkembangan diberbagai bidang masih menunjukkan grafik vertikal, stabil dan dinamis. Sedangkan pada periode

II, kejayaan terus merosot sampai datangnya pasukan Tartar yang berhasil mengancurkan Dinasti Abbasiyah.

- i. Popularitas Dinasti Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya al-Ma'mun. Kekayaan banyak digunakannya dalam bentuk sosial, yakni dengan berbagai macam pembangunan tempat dan sarana Umum. Pada masanya pula terdapat 800 tabib , dan pada masa inilah kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, kesusteraan berada pada keemasannya. Dan pada masa inilah negara Islam, menjadi negara kuat yang tak tertandingi. Begitu pula dengan putranya, yakni al makmun, ia sangat cinta sekali dengan berbagai macam ilmu pngetahuan, sehingga pada masa kekhalifahannya bernagai macam buku ia terjemahkan, dan tak segan-segan menggaji berbagai penerjemah bahasa,pada masanya inilah yang menjadikan kota Bagdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- j. Faktor-faktor yang menjadi sebab kemunduran Dinasti Abbasiyah adalah: Pertentangan internal keluarga. Seperti halnya al-Manshur melawan Abd Allah ibn Ali pamannya sendiri. Konflik ini yang mengakibatkan keretakan psikologis yang mendalam dan menghilangkan solidaritas keluarga, sehingga mengakibatkan campur tangan kekuatan dari luar; Kehilangan kendali dan munculnya dinasti-dinasti kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Maryam. Siti. *Sejarah Peradaban Islam Dari Masa Klasik Hinga Modern*. Yogyakarta:LESFI, 2004.
- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab* (Cet. II, Logos Wacana Ilmu; Jakarta: 1999.
- Nasution, Harun. “Pembaharuan Dalam Islam” dalam Muhammad Saleh Tajuddin dkk, *Dunia Islam dalam Lintasan Sejarah dan Realitasnya di Era Kontemporer, Syi’ah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembanganya di Indonesia*, Jurnal Al-Fikr Vol. 20 No. 2 (Tahun 2016),
- Nasution, Syamruddin. *Sejarah Peradaban Islam*, (Pekanbaru: Yayasan pusaka Riau, 2013.
- Rofiq, Choirul. *Sejarah Peradaban Islam- Dari Masa Klasik Hinga Modern*, Ponorogo: STAIN Press, 2009.
- Syalabi. *Sejarah dan kebudayaan Islam 2*. Jakarta: PT Pustaka Al Husna Baru, 2003.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*. Cet. XII, PT. Raja Grafindo Persada; Jakarta: 2001.

SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI



Diajukan Pada Seminar/Diskusi Konsentrasi Pemikiran Islam Semester 3
Dalam Mata Kuliah Pemikiran Politik Islam

OLEH
GALIH SAPUTRA
80100216069

Dosen Pemandu:
Prof. Dr. Usman Djafar, M.Ag
Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, M.Ag.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan sebuah istilah yang sangat populer. Tidak ada istilah lain dalam wacana politik yang banyak dibicarakan orang, aktivis, politisi ataupun akademisi, melebihi istilah demokrasi. Istilah ini juga didambakan semua orang terutama yang mempunyai kesadaran politik, untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa demokrasi akan lebih banyak membawa kemaslahatan manusia ketimbang implikasi negatifnya, yakni mahal dan kompleksnya dalam proses pembuatan kebijakan publik.¹

Wacana tentang demokrasi seringkali dikaitkan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan ini, misalnya islam dan demokrasi, demok-ratisasi pendidikan islam dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

- a. Apa definisi demokrasi?
- b. Bagaimana hubungan agama dengan demokrasi?
- c. Bagaimana mengenai demokrasi dan Islam?

¹ Afan Gaffar, Politik Indonesia: *Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), vii.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Demokrasi

Asal kata demokrasi adalah “*demos*”, sebuah kosa kata Yunani berarti masyarakat, dan “*kratio*” atau “*krato*” yang dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan. Demokrasi secara etimologis berarti “pemerintahan oleh rakyat” (*rule by the people*). Dilihat dari sejarahnya, pertama kali, istilah ini digunakan sekitar lima abad sebelum Masehi. Chleisthenes—tokoh pada masa itu—dianggap banyak memberi kontribusi dalam pengembangan demokrasi. Chleisthenes adalah tokoh pembaharu Athena yang menggagas sebuah sistem pemerintahan kota. Pada 508 SM, Chleisthenes membagi peran warga Athena ke dalam 10 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari beberapa *demes* yang mengirimkan wakilnya ke Majelis yang terdiri dari 500 orang wakil.

Sejatinya, jauh sebelum bangsa Yunani mengenal demokrasi. Para ilmuwan meyakini, bangsa Sumeria yang tinggal di Mesopotamia juga telah mempraktikkan bentuk-bentuk demokrasi. Konon, masyarakat India Kuno pun telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan mereka, jauh sebelum Yunani dan Romawi.

“*Demokrasi muncul dari pemikiran manusia,*” ungkap Aristoteles seorang pemikir termasyhur dari Yunani. Gagasan demokrasi yang berkembang di Yunani sempat hilang di barat, saat Romawi Barat takluk ke tangan suku Jerman. Pada abad pertengahan, Eropa Barat menganut sistem feodal. Kehidupan sosial dan spiritual dikuasai Paus dan pejabat agama Lawuja Magna Charta yang lahir pada 1215 dianggap sebagai jalan pembuka munculnya kembali demokrasi di Barat. Pada masa itu, muncullah pemikir-pemikir yang mendukung berkembangnya demokrasi seperti, John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesquieu dari Prancis (1689-1755).

Demokrasi tumbuh begitu pesat ketika sampai masa renaissance, istilah ini digunakan untuk suatu sistem demokrasi langsung, yakni masyarakat secara langsung menempati posisi pemerintahan. Mereka berperan dalam seluruh

aktivitas politik, legislatif, eksekutif, yudikatif dsb. Sejak dulu, sistem pemerintahan semacam ini ditentang oleh filsuf-filsuf besar. Plato menyifatnya sebagai pemerintahan orang-orang bodoh. Aristoteles menamakannya pemerintahan orang-orang miskin tak berkeutamaan. Abu Nasr Al-Farabi dan Ibn Rusyd menyebutnya sebagai kebusukan dalam pemerintahan utama (madinah fadhilah).

Salah satu keberatan lain yang cukup kasat mata adalah bahwa sistem ini sama sekali tidak praktis apabila jumlah masyarakat telah membesar. Oleh karena itu, Jean Jacques Rousseau beserta filsuf politik lain menyempurnakannya dengan teori demokrasi perwakilan, sistem pemilihan para wakil rakyat sebagai pemerintah. Sistem perwakilan ini telah menjadi norma berharga dan prinsip yang diterima di dunia sehingga memaksa banyak cendekiawan muslim menciptakan teori demokratisasi Islam.

Secara normatif, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.² Sedangkan pengertian dari sistem politik demokrasi dinyatakan oleh Hendry B. Mayo “*a democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*”³ (sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi oleh rakyat secara efektif

² Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) berarti pemerintahan yang berkuasa mendapatkan pengakuan atau legitimasi dari rakyat. Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat dan diawasi oleh rakyat. Sedangkan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) berarti pemerintahan yang berkuasa dalam rangka mewujudkan aspirasi rakyat. Untuk mewujudkan *government for the people* tidak mengenal istilah korupsi dalam pemerintahan dalam artian jika masih ditemukan tindak korupsi berarti *government for the people* tidak terwujud. Lihat: A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 165

³ Hendry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960), 70. Suatu pemerintahan menganut sistem politik demokrasi pada dasarnya didasari oleh dua alasan, *pertama*, hampir semua negara di dunia ini menjadikan demokrasi sebagai asas fundamental. *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertinggi. Lihat: Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 5-6.

dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik).

Sedangkan Sadek J. Sulaiman⁴ mengatakan bahwa prinsip dasar demokrasi adalah adanya kesamaan antara seluruh manusia. Apa pun bentuk diskriminasi manusia, baik yang berdasarkan ras, gender, agama, status sosial, adalah bertentangan dengan demokrasi.⁵ Lebih lanjut ia mengatakan dalam demokrasi ada tujuh prinsip: *Pertama*, kebebasan berbicara. Dalam sistem ini setiap warga negara bebas untuk mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal ini sangat penting untuk mengontrol kekuasaan agar berjalan dengan benar. *Kedua*, pelaksanaan pemilu. Pemilu ini merupakan sarana konstitusional untuk melihat dan menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain. *Ketiga*, kekuasaan dipegang oleh mayoritas tanpa mengabaikan control minoritas. Prinsip ini mengakui adanya hak oposisi suatu kelompok terhadap pemerintah. *Keempat*, sejalan dengan prinsip ketiga, dalam sistem demokrasi, partai politik memainkan peranan penting, rakyat berhak dengan bebas mendukung partai mana yang lebih sesuai dengan pandangan dan pilihannya. *Kelima*, demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada *checks and balances*, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif. *Keenam*, demokrasi menekankan adanya supremasi hukum. Semua individu harus tunduk dibawah hukum, tanpa memandang kedudukan dan status sosialnya. *Ketujuh*, dalam demokrasi, semua individu atau kelompok bebas melakukan perbuatan. Karenanya semua individu bebas mempunyai hak milik, tanpa boleh diganggu oleh pihak manapun.

B. Hubungan Agama dengan Demokrasi

Memperbincangkan hubungan agama dan demokrasi, dalam hal ini terdapat tiga pandangan atau model yaitu⁶:

⁴ Ia adalah seorang mantan duta besar Oman untuk Amerika Serikat.

⁵ Sulaiman, "Demokrasi dan Shura.", dalam

⁶ Lihat: A. Ubaidillah, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, 194-196 dalam

- a. Model paradoksal atau model negatif yang menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan berlawanan (agama versus demokrasi). Adapun tokoh penganut pandangan ini ini adalah Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Paling tidak ada tiga argumen tentang tidak sejalannya antara agama dan demokratisasi. *Pertama*, argumen historis-sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran peran agama tidak jarang hanya digunakan oleh penguasa politik dan pimpinan organisasi keagamaan untuk mendukung kepentingan kelompok. *Kedua*, argument filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan meng-geser otonomi dan kemerdekaan manusia yang berarti juga meng-geser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, argumen teologis yang mene-gaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan, padahal Tuhan tidak hadir secara empiris, sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkret dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi;
- b. Model sekuler atau model netral menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan sendiri-sendiri. Persoalan agama me-nyangkut persoalan pribadi dengan Tuhannya, dalam artian ajaran agama tidak masuk dalam wilayah publik atau negara, begitu pula ne-gara tidak mengurus agama;
- c. Model teodemokrasi atau model positif menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian.

C. Demokrasi dan Islam

Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran: *Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda.⁷ Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang mandiri (*self-sufficient*). Hubungan keduanya saling menguntungkan secara eksklusif (*mutually exclusive*). Islam dipandang sebagai sistem politik alternatif terhadap demokrasi. *Kedua*, Islam berbeda dengan

⁷ A. Ubaidillah dan Abdul Rrozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006), h. 158.

demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosudural seperti dipahami dan dipraktekkan di negara-negara Barat.⁸ Kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Tetapi mengakui adanya perbedaan antara Islam dan demokrasi. Dalam pandangan kelompok ini, demokrasi adalah konsep yang sejalan dengan Islam setelah diadakan penyesuaian penafsiran terhadap konsep demokrasi itu sendiri. Di antara tokoh dari kelompok ini adalah al-Maududi, Rashid al-Ghanaoushi, Abdul Fattah Morou dan Taufiq As-Syawi. Di Indonesia diwakili oleh Moh. Natsir dan Jalaluddin Rahmat.⁹

Ketiga, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju.¹⁰ Islam di dalam dirinya demokratis tidak hanya karena prinsip *syura* (musyawarah), tetapi juga karena adanya konsep *ijtihad* dan *ijma* (konsensus). Seperti dinyatakan oleh pakar ilmu politik R. William Liddle dan Saeful Mujani, di Indonesia pandangan yang ketiga tampaknya yang lebih dominan karena demokrasi sudah menjadi bagian integral sistem pemerintahan Indonesia dan negara-negara muslim lainnya. Di antara tokoh muslim yang mendukung pandangan ini adalah Fahmi Huwaidi, al-‘Aqqad, M. Husain Haikal, Zakaria Abdul Mun’im Ibrahim, Hamid Enayat, Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Di Indonesia diwakili oleh Nurcholis Madjid, Amin Rais, Munawir Syadzali, Ahmad Syafi’i Ma’rif dan Aburrahman Wahid.⁴³ Penerimaan negara-negara muslim (dunia Islam) terhadap demokrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh kelompok ketiga, tidak berarti bahwa demokrasi dapat tumbuh dan berkembang di negara muslim secara otomatis dan cepat. Bahkan yang terjadi adalah kebalikannya dimana negara-negara muslim justru merupakan negara yang tertinggal dalam berdemokrasi, sementara kehadiran rezim otoriter di sejumlah negeri muslim menjadi trend yang dominan.

⁸ A. Ubaidillah dan Abdul Rrozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* dalam Zuhriani, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1 (Juni 2014), h. 44

⁹ A. Ubaidillah dan Abdul Rrozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* dalam Zuhriani, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1 (Juni 2014), h. 44

Konsep demokrasi bukanlah konsep yang mudah dipahami, sebab konsep ini memiliki banyak konotasi makna yang bervariasi, evolutif dan dinamis. Demokrasi bermakna variatif, karena sangat bersifat interpretatif. Setiap penguasa negara berhak mengklaim negaranya sebagai demokratis, meskipun nilai yang dianut atau praktek politik kekuasaannya amat jauh dari prinsip-prinsip dasar demokrasi. Karena sifatnya yang interpretatif itu, kita mengenal berbagai tipologi demokrasi seperti demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi proletar, demokrasi komunis, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi parlementer dan lain-lain.¹¹

Dalam diskursus politik Islam kontemporer, *syura* sering dikaitkan dengan demokrasi. Kata *syura* yang berasal dari kata kerja “*syawara-yusyawiru*” secara etimologis berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk lain yang berasal dari kata kerja “*syawara*” adalah *asyara* (memberi isyarat), “*tasyawara*” (berunding, saling bertukar pendapat), “*syawir*” (meminta pendapat), dan “*mustasyir*” (meminta pendapat orang lain). Dari istilah-istilah di atas dapat dimengerti bahwa *syura* adalah saling menjelaskan dan merundingkan pendapat atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Jika merujuk pada definisi istilah yang tertera dalam kamus “*Lisan al-‘Arab*” maka kata *syura* yang berasal dari kata “*sya-w-r*” secara etimologis berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah.¹² Dari definisi ini, Quraish Shihab memberikann definisi *syura* dengan segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Menurutnya hal tersebut semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.¹³

Secara garis besar, ada pendapat yang saling berbeda secara diametral mengenai kompatibilitas *syura* dan demokrasi. Pendapat *pertama*, misalnya dianut oleh Syarqawi Dhafir yang menyatakan bahwa pada hakekatnya demokrasi itu sama saja alias tidak bertentangan sama sekali dengan prinsip *syura*. Pendapat

¹¹ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat Kajian sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 297.

¹² Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 434.

¹³ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur‘an* (Bandung: Mizan, 1996), 469

kedua, menyatakan bahwa demokrasi yang berasal dari konsep Barat yang sangat kurang penekanannya terhadap aspek spiritual tidaklah bersesuaian dengan *syura* yang amat sarat dengan muatan spiritual. Pendapat *ketiga* dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa persamaan antara *syura* dan demokrasi hanyalah sebagian dari hakikatnya. Karena itu, menurut Hasbi, pendapat yang lebih tepat adalah bahwa *syura* dan demokrasi itu bukanlah tata aturan yang serupa, tetapi antara keduanya terdapat unsur-unsur persamaan di samping unsur-unsur perbedaan¹⁴

Hal yang perlu diingat dari konsep demokrasi adalah ia tidak bersifat statis; ia merupakan hasil *power sharing* yang mencerminkan tingkat keseimbangan antara dua pihak yang melakukan tarik-menarik, yakni rakyat dengan kesadaran partisipasi dan penguasa dengan kesadaran otoritasnya. Bagian tengah (moderasi) dari *power sharing* itulah letak di mana demokrasi berada. Apabila kesadaran peran-serta rakyat terlalu dominan, maka yang terjadi adalah anarki. Sebaliknya, apabila penguasa berada pada posisi dominan, maka yang terjadi adalah otoritarian. Demokrasi yang diiringi dengan destabilisasi anarki tak jarang akan menimbulkan sikap brutal bahkan pembunuhan atau jatuh bangunnya pemerintahan akibat mosi tidak percaya atau kudeta konstitusional.¹⁵

Jika demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan prinsip *kebebasan*, *kesetaraan*, dan *kedaulatan* manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan Islam. Hal ini paling tidak akan tampak dalam dua hal.

Pertama, pada ajaran islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan, yaitu¹⁶:

- a. *Al-Musawah* atau persamaan derajat kemanusiaan di hadapan Allah swt. Dalam konsepsi islam, semua manusia sama dalam martabat dan

¹⁴ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan Antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya Dengan Demokrasi Pancasila*, dalam Zuhraeni, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014, h.46-47

¹⁵ Muhajir Efendi, *Masyarakat Equilibrium* (Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002), h. 21.

¹⁶ Abdul Ghofur, *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*, Islamuna Volume 1 Nomor 1 (Juni 2014), h. 39

kedudukannya, tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali dalam hal ketakwaanya. Allah berfirman dalam Surat al-Hujurat (49) ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Terjemahannya: "Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

- b. *Al-Hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan berdasarkan pertanggungjawaban moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Prinsip ini didasari oleh konsep yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang memandang bahwa manusia adalah makhluk terhormat yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mempunyai kebebasan memilih. Dalam islam, prinsip ini adalah ayat perjanjian ketika manusia membenarkan ke-*rububiyah*-an Allah. Allah berfirman dalam Surat al-A'raf (7) ayat 172:

قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ١٢

Terjemahannya: "dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)".

- c. *Al-Ukhuwwah*, persaudaraan sesama manusia sebagai satu species yang diciptakan dari bahan baku yang sama. Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah (2) ayat 213:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢١٣

Terjemahannya: "Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus Para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi

keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, Yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”.

- d. Al-Adalah, keadilan yang berintikan kepada pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Allah berfirman dalam Surat al-Ma'idah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahannya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

- e. Al-Syura, musyawarah, dimana setiap warga masyarakat berhak atas partisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam hal ini mengutamakan prinsip musyawarah sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Syura (42) ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝٣٨

Terjemahannya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Menurut Muhammad Alim, negara demokrasi: Syura (mu-syawarah sebagai demokrasi Islam), ditandai dengan¹⁷ kebebasan berbicara dan mengeluarkan

¹⁷ Lihat: Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan* (Yogyakarta: LKIS, 2010), 159-229. Wacana Islam dan demokrasi (Syura, demokrasi islam) tidak hanya mengadopsi dan menyatakan sebagai sesuatu yang islami atau cocok dengan islam, elemen-elemen tertentu dari organisasi politik demokrasi modern seperti

pendapat, kebebasan dari ketakutan, kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi, kebebasan memilih tempat tinggal, persamaan, kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak atas suaka politik, hak dan kewajiban membela negara, dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi.

- f. *Al-Mas'uliyah/responsibility*, prinsip pertanggungjawaban yang dipikul oleh setiap pemegang kekuasaan. Perlu dipahami bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus diwaspadai dan bukan nikmat yang harus disyukuri. Khusus bagi penguasa, pengertian amanah berarti fungsi ganda yakni amanat Allah dan amanat rakyat.¹⁸

Kedua, ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan pemenuhannya oleh diri sendiri maupun masyarakat/negara yang meliputi:

- a. *Hifdz al-nafsi*, hak hidup;¹⁹
- b. *Hifdz al-din*, hak beragama;²⁰
- c. *Hifdz al-'aqli*, hak untuk berpikir;²¹
- d. *Hifdz al-mal*, hak milik individu/property right;²²
- e. *Hifdz al-'irdh*, hak mempertahankan nama baik;²³
- f. *Hifdz al-nasl*, hak untuk memiliki dan melindungi keturunan.²⁴

BAB III PENUTUP

Menurut uraian yang telah dikemukakan terkait dengan materi makalah *Sistem Pemerintahan Demokrasi* maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem politik demokrasi adalah suatu sistem yang menjamin bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang

pemilihan umum, perwakilan, pemerintahan parlementer atau pemisahan kekuasaan. Namun wacana tersebut juga memasukkan

¹⁸ A. Malik Madaniy, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 50.

¹⁹ QS. al-Maidah: 45; QS. al-Isra': 33.

²⁰ QS. al-Baqarah: 256; QS. al-Kahfi: 29; QS. al-Kafirun: 1-6.

²¹ QS. al-Ahqaf: 19; QS. al-Baqarah: 164.

²² QS. al-Baqarah: 29; QS. an-Nisa': 29.

²³ QS. at-Taubah: 6.

²⁴ QS. al-Baqarah: 221; QS. ar-Rum: 21; QS. an-Nisa': 1; QS. at-Tahrim: 6.

diawasi oleh rakyat secara efektif dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik;

2. Memperbincangkan hubungan agama dan demokrasi, dalam hal ini terdapat tiga pandangan atau model yaitu: Model paradoksal atau model negatif yang menyatakan bahwa antara agama dan demokrasi tidak dapat dipertemukan bahkan berlawanan (agama versus demokrasi; Model sekuler atau model netral menyatakan bahwa hubungan agama dengan demokrasi bersifat netral, di mana urusan agama dan politik termasuk demokrasi berjalan sendiri-sendiri; dan Model teodemokrasi atau model positif menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian;
3. Secara garis besar wacana Islam dan demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pemikiran: *Pertama*, Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda, *Kedua*, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosudural seperti dipahami dan di praktekkan di negara-negara Barat, dan *Ketiga*, Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang dipraktikkan negara-negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Muhammad. *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: LKIS, 2010.
- Effendi, Muhajir, *Masyarakat Equilibrium*. Yogyakarta: Bintang Budaya, 2002.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

Ghofur, Abdul. *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur*, Islamuna: Volume 1 Nomor 1 (Juni 2014)

Ibn Manzur, Lisan al-'Arab , Jilid 4, Beirut: Dar al-Shadr, 1968..

Madaniy, A. Malik, *Politik Berpayung Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 50.

Mahfud MD, Moh. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gema Media, 1999

Mayo, Hendry B. *An Introduction to Democratic Theory* (New York: Oxford University Press, 1960

Shihab, Muhammad Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1996.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat Kajian sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001

Sukardja, Ahmad dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi dalam Perspektif Islam: Studi Perbandingan Antara Konsep Syura dan Demokrasi Barat dalam Kaitannya Dengan Demokrasi Pancasila*, dalam Zuhraeni, *Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1, Juni 2014

Ubaidillah, A. dan Abdul Rrozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani* dalam Zuhraeni, **Islam: Negara, Demokrasi, Hukum dan Politik**, ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, Volume 14, Nomor 1 (Juni 2014)

Ubaidillah, A. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.